



**PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia)**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Adyta Nur Yasinta
0221 13 235

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

APRIL 2017

**PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

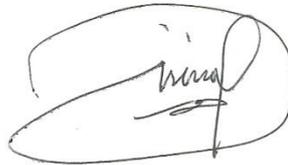
**PENGARUH PENJUALAN BERSIH DAN BEBAN KOMERSIAL
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Rabu, Tanggal: 3 Mei 2017

Adyta Nur Yasinta
0221 13 235

Menyetujui
Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing,



(Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak., C.FE., C.FrA., CA)

Anggota Komisi Pembimbing,



(Siti Maimunah, S.E., M.Si)

ABSTRAK

ADYTA NUR YASINTA, 022113235. Pengaruh Penjualan Bersih Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) di bawah bimbingan ERNADHI SUDARMANTO dan SITI MAIMUNAH. 2017.

Setiap perusahaan yang mempunyai kegiatan proses produksi tidak terlepas dari kegiatan penjualan, sebab kegiatan penjualan bagi perusahaan terutama perusahaan manufaktur merupakan pendapatan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Pendapatan merupakan tujuan utama bagi setiap kegiatan usaha, maka tiap perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu dapat meningkatkan laba, untuk kemudian dihitung berdasarkan peraturan perpajakan untuk memperoleh pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan perolehan penjualan bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2) mendeskripsikan perolehan beban komersial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3) mendeskripsikan pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia. Total sampel dalam penelitian adalah 36 perusahaan dengan jumlah 72 laporan keuangan terdiri dari 36 laporan keuangan tahun 2014 dan 36 laporan keuangan tahun 2015. Banyaknya sampel dipilih melalui metode *purposive sampling*. Metode penelitian ini adalah statistik deskriptif. Alat analisis yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software *Statistic Product Service Solution (SPSS)* versi 21.0.

Berdasarkan Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) penjualan bersih dan beban komersial secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan terutang. 2) penjualan bersih dan beban komersial secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan terutang.

Kata kunci: *Penjualan Bersih, Beban Komersial, Pajak Penghasilan Terutang,*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul yaitu “Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. Penyusunan skripsi ini salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan pada program studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini berkat kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tak pernah henti.
2. Adik tersayang, Adilia Putri yang selalu memberikan doa, menjadi penyemangat dan selalu menghibur disaat merasa bosan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., M.Ak., C.FE., C.FrA., CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Maimunah, S.E., M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1.
7. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pelaksana Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
11. Komti Kelas F Akuntansi 2013 Harianto Pratama Putera yang selalu memberikan informasi mengenai perkuliahan.

12. Sahabat-sahabat tercinta, Nurhasanah, Ayu Rahayu, Wasfah, Lusiana, Fitri dan Nurfitriyana yang selalu setia membantu serta menjadi penyemangat disaat mengalami masa-masa sulit.
13. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
14. Teman-teman terbaik saya, Mega, Amanda, *Mas* Thoriq, Ali, dan *Mas* Dicky yang selalu memberi semangat, dukungan dan doanya.
15. Teman-teman kelas F Akuntansi 2013 dan teman-teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan 2013.
16. Dan semua pihak yang telah memberikan doa dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi terciptanya sebuah skripsi yang bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan isinya.

Bogor, April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Laporan Keuangan	10
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan	10
2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan	11
2.1.3. Jenis Laporan Keuangan	11
2.1.3.1. Laporan Posisi Keuangan	11
2.1.3.2. Laporan Laba Rugi	12
2.1.3.3. Laporan Arus Kas	13
2.1.4. Penjualan	14
2.1.5. Beban Komersial	15
2.2. Pajak Penghasilan.....	16
2.2.1. Pengertian Pajak	16
2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	17
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan	18
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan	20
2.2.5. Tarif PPh WP Badan	22
2.2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.....	23
2.3. Penelitian Terdahulu	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	26
2.5. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.2.1. Objek Penelitian	30

3.2.2. Unit Analisis	30
3.2.3. Lokasi Penelitian	30
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.3.1. Jenis Data Penelitian	30
3.3.2. Sumber Data Penelitian	30
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	30
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	31
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	34
3.7. Metode Analisis Data	34
3.7.1. Statistik Deskriptif	34
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	34
3.7.3. Uji Hipotesis	36
3.7.4. Analisis Regresi Berganda	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1. Profil Perusahaan	41
4.2. Data Variabel Independen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	55
4.3. Data Variabel dependen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	59
4.4. Analisis Data	62
4.4.1. Uji Analisis Deskriptif	62
4.4.2. Uji Asumsi Klasik	63
4.4.3. Uji Hipotesis	66
4.4.4. Analisis Regresi Berganda	68
4.5. Interpretasi Hasil Penelitian	69
4.5.1. Pengaruh Penjualan Bersih terhadap PPh terutang	70
4.5.2. Pengaruh Beban Komersial terhadap PPh terutang	70
4.5.3. Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang	71

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Data Penjualan Bersih dan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2014.....	4
Tabel 2 : Data Penjualan Bersih dan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2015.....	6
Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel 4 : Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.....	32
Tabel 5 : Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	39
Tabel 6 : Data Penjualan Bersih	55
Tabel 7 : Data Beban Komersial	57
Tabel 8 : Data Pajak Penghasilan Terutang	60
Tabel 9 : Hasil Uji Analisis Deskriptif	62
Tabel 10 : Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 11 : Hasil Uji Autokorelasi	65
Tabel 12 : Hasil Uji t	66
Tabel 13 : Hasil Uji F	67
Tabel 14 : Hasil Uji Determinasi	68
Tabel 15 : Hasil Analisis Regresi Berganda	68
Tabel 16 : Hasil Pengujian Hipotesis	69

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2 : Hasil Uji Normalitas	63
Gambar 3 : Hasil Uji Normalitas	63
Gambar 4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Para pemilik perusahaan terutama untuk perusahaan-perusahaan *go public* mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap laporan keuangan perusahaan mereka. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan yang disusun dengan wajar dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memiliki potensi yang besar untuk membantu perusahaan dalam penginformasian posisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan terutama para investor.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 tahun 2015 di antaranya untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang umumnya disebut stakeholder (Budi,2009:1), sedangkan laporan keuangan tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi perusahaan kepada para pemegang saham dan disusun dengan aturan-aturan tertentu dalam PSAK.

Kebanyakan laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*) mencakup tiga unsur yaitu uraian, ilustrasi gambar, dan angka-angka. Secara umum, uraian biasanya singkat dan mudah dimengerti. Gambar-gambar berguna untuk membuat penampilan lebih menarik. Sedangkan angka-angka adalah bagian yang tidak mudah dimengerti dan dipahami bagi para pembaca awam termasuk manajer dan nonkeuangan (Budi, 2009:4). Untuk itu diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan yang dijelaskan melalui catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan memiliki sasaran yang luas. Oleh karena itu terjadi perbedaan kepentingan terhadap laporan keuangan antara pengguna laporan keuangan sehingga dibutuhkan peraturan agar laporan keuangan menjadi tidak bias serta dapat disajikan sewajar mungkin dan bisa digunakan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai informasi keuangan. Karena pada hakikatnya laporan keuangan bersifat umum dalam arti laporan tersebut ditujukan pada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Budi,2009:2), maka dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan, manajemen perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK. Jika belum ditentukan dalam PSAK, maka

manajemen membuat kebijakan akuntansi sendiri yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan. Aturan lain yang harus dipatuhi adalah aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) diantaranya KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman penyajian laporan keuangan.

Menurut PSAK No.1 paragraf 7 tahun 2015, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan utama yang digunakan pada umumnya yaitu hanya berupa neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.

Satu diantara informasi yang harus disajikan dalam laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur adalah penjualan yang merupakan pendapatan sebagai penghasilan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi (Sofjan,2013,23). Kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Pendapatan merupakan tujuan utama bagi setiap kegiatan usaha, maka tiap perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan itu dapat meningkatkan laba yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa disebut dengan sebutan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, seperti: penjualan (*sales*), penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty, dan sewa (Budi, 2009,47). Untuk menghasilkan laba yang maksimal, perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini yakni perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu melakukan kegiatan penjualan barang dan bila barang tersebut sudah dijual maka pendapatan dilaporkan sebagai penjualan.

Penjualan bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dalam perusahaan diproses melalui register kas dan dicatat dalam akun-akun yang bersangkutan dengan transaksi yang terjadi. Sedangkan penjualan yang dilakukan secara kredit (*sales on account*), dicatat oleh penjual sebagai debit ke piutang usaha dan kredit ke penjualan.

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menjelaskan pendapatan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan yang biasa disebut penjualan. Dalam melakukan penjualan, adakalanya perusahaan harus menerima pengembalian barang dari pelanggan maupun memberikan potongan atau diskon terhadap penjualan barang, setelah penjualan awal dikurangi dengan faktor-faktor pengurang penjualan barulah diperoleh penjualan bersih.

Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang

direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual akan menghasilkan laba.

Untuk mendapatkan laba sebelum pajak, maka penjualan bersih harus dikurangkan terlebih dahulu dengan total beban perusahaan yakni yang disebut beban komersial dan ditambah dengan penghasilan lain-lain. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan ditambah beban usaha, dan beban lain-lain. Beban usaha yaitu jumlah beban penjualan ditambah jumlah beban umum dan beban administrasi perusahaan.

Berbicara mengenai pajak berarti berbicara mengenai pengeluaran yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Jika kita hanya melihat pajak dalam definisi di atas, berarti kita melihat pajak dalam suatu definisi lengkap yaitu iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sumber pembiayaan yang terbesar pada saat ini adalah berasal dari pajak. Sehingga pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak seperti yang telah diestimasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai seoptimal mungkin.

Menurut PSAK No.46 paragraf 57 tahun 2015 salah satu unsur beban (penghasilan) pajak yaitu beban (penghasilan) pajak kini, yang menurut PSAK No.46 paragraf ke 7 tahun 2015 dijelaskan bahwa pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pada umumnya manajemen perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil sehingga mereka melaporkan laba bersih yang kecil, besarnya beban komersial dapat mengurangi beban pajak kini atau Pajak Penghasilan terutang yang dihitung atas penghasilan kena pajak. Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimal. Selain itu pajak merupakan unsur pengurang laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali, untuk itu manajemen perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

Fenomena menunjukkan bahwa kerap kali terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan utama antara kedua laporan keuangan ini disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan yang mengacu pada PSAK. Pada dasarnya antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya.

Dalam penelitian ini, perusahaan-perusahaan yang diteliti tentunya memiliki jumlah penjualan bersih yang berbeda-beda. Yang menarik di sini, adalah ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah penjualan bersih tinggi namun jumlah Pajak Penghasilan terutangnya rendah. Sebaliknya ada yang memiliki jumlah penjualan bersih rendah namun Pajak Penghasilan terutangnya tinggi. Tetapi ada juga yang memiliki penjualan bersih tinggi dan Pajak Penghasilan terutangnya tinggi. Dan penjualan bersihnya rendah namun Pajak Penghasilan terutangnya juga rendah.

Tabel 1
Data Penjualan Bersih dan PPh Terutang Tahun 2014
(Dalam Rupiah)

1. Sektor Industri Dasar & Kimia

a. Sub Sektor Semen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
1	Semen Indonesia (Persero) Tbk	26.987.035.135.000	-1.509.616.169.000
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.214.914.932.000	-68.854.736.000

b. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
3	Arwana Citramulia Tbk	1.609.758.677.687	86.804.627.930
4	Asahimas Flat Glass Tbk	3.672.186.000.000	141.011.000.000

c. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
5	Betonjaya Manunggal Tbk	96.008.496.750	-1.944.806.795
6	Indal Aluminium Industry Tbk	933.462.438.255	-10.767.831.476
7	Lion Metal Works Tbk	377.622.622.150	-13.863.444.789
8	Pelangi Indah Canindo Tbk	694.332.286.638	-4.311.636.994

d. Sub Sektor Kimia

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
9	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	132.775.925.237	-2.666.140.398
10	Indo Acidatama Tbk	472.834.591.000	-15.449.748.000
11	Ekadharna International Tbk	526.573.620.057	-18.041.856.224
12	Budi Starch & Sweetener Tbk	2.284.211.000.000	14.995.000.000
13	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	2.132.090.000.000	-56.377.000.000

e. Sub Sektor Plastik & Kemasan

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
14	Kageo Igar Jaya Tbk	737.863.227.409	-21.039.436.778
15	Trias Sentosa Tbk	2.507.884.797.367	-33.074.450.519
16	Berlina Tbk	1.258.841.240.000	-17.794.581.000

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
17	Alkindo Naratama Tbk	493.881.857.454	-7.143.734.196
18	Kedawung Setia Industrial Tbk	1.626.232.662.544	-13.888.383.230

g. Sub Sektor Pakan Ternak

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
19	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	24.458.880.000.000	159.543.000.000
20	Malindo Feedmill Tbk	4.502.078.127.000	23.574.474.000

2. Sektor Aneka Industry

a. Sub sektor tekstil dan garment

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
21	Ricky Putra Globalindo Tbk	1.185.443.580.242	-6.365.106.670
22	Sunson Textile Manufacture Tbk	519.854.661.831	4.249.340.838
23	Nusantara Inti Corpora Tbk	102.448.044.300	-25.353.626.695

b. Sub sektor kabel

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
24	Kabelindo Murni Tbk	919.537.870.594	-6.871.966.432
25	Jembo Cable Company Tbk	1.493.012.114.000	-9.300.196.000

c. Sub Sektor Otomotif & Komponen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
26	Indomobil Sukses Internasional Tbk	19.458.165.173.088	-86.720.219.140
27	Garuda Metalindo Tbk	961.863.464.869	-45.672.046.749

3. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub Sektor Makanan & Minuman

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
28	Mayora Indah Tbk	14.169.088.278.238	119.649.017.130
29	Nippon Indosari Corpindo Tbk	1.880.262.901.697	64.208.995.297
30	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	3.916.789.366.423	-91.896.185.643

b. Sub Sektor Rokok

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
31	Gudang Garam Tbk	65.185.850.000.000	-1.822.046.000.000
32	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	80.690.139.000.000	-3.537.216.000.000
33	Wisnilak Inti Makmur Tbk	1.661.533.200.316	37.359.691.059

c. Sub Sektor Farmasi

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPH Terutang
34	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk	2.197.907.000.000	-131.231.000.000
35	Kalbe Farma Tbk	17.368.532.547.558	642.915.814.984
36	Darya Varia Laboratoria Tbk	1.103.821.775.000	-25.159.730.000

Sumber : Data Diolah dari website www.idx.co.id,2017

Tabel 2
Data Penjualan Bersih dan PPh Terutang Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

1. Sektor Industri Dasar & Kimia

a. Sub Sektor Semen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
1	Semen Indonesia (Persero) Tbk	26.948.004.471.000	-1.325.482.459.000
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.461.248.284.000	-89.234.190.000

b. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
3	Arwana Citramulia Tbk	1.291.926.384.471	24.304.373.076
4	Asahimas Flat Glass Tbk	3.665.989.000.000	122.917.000.000

c. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
5	Betonjaya Manunggal Tbk	67.679.530.150	-1.480.484.072
6	Indal Aluminium Industry Tbk	1.384.675.922.166	-28.615.673.167
7	Lion Metal Works Tbk	389.251.192.409	-12.433.164.026
8	Pelangi Indah Canindo Tbk	699.310.599.565	-2.475.910.983

d. Sub Sektor Kimia

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
9	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	118.475.319.120	-1.972.849.888
10	Indo Acidatama Tbk	531.573.325.000	-5.209.875.000
11	Ekadharna International Tbk	531.537.606.573	-19.266.661.660
12	Budi Starch & Sweetener Tbk	2.378.805.000.000	31.053.000.000
13	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	2.506.680.000.000	-26.065.000.000

e. Sub Sektor Plastik & Kemasan

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
14	Kageo Igar Jaya Tbk	677.331.846.043	-11.820.161.899
15	Trias Sentosa Tbk	2.457.349.444.991	-25.783.708.943
16	Berlina Tbk	1.278.353.442.000	-4.732.183.000

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
17	Alkindo Naratama Tbk	538.363.112.800	-8.374.792.461
18	Kedawung Setia Industrial Tbk	1.713.946.192.967	-3.419.704.975

g. Sub Sektor Pakan Ternak

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
19	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	25.022.913.000.000	173.193.000.000
20	Malindo Feedmill Tbk	4.775.014.772.000	10.036.342.000

2. Sektor Aneka Industry

a. Sub sektor tekstil dan garment

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
21	Ricky Putra Globalindo Tbk	1.111.051.293.008	-8.932.127.892
22	Sunson Textile Manufacture Tbk	506.180.498.366	3.047.164.643
23	Nusantara Inti Corpora Tbk	118.260.140.704	-1.275.438.361

b. Sub sektor kabel

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
24	Kabelindo Murni Tbk	967.710.339.797	-8.712.277.887
25	Jembo Cable Company Tbk	1.663.335.876.000	-6.031.664.000

c. Sub Sektor Otomotif & Komponen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
26	Indomobil Sukses Internasional Tbk	18.099.979.783.215	-205.796.287.059
27	Garuda Metalindo Tbk	858.650.225.152	-35.250.725.087

3. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub Sektor Makanan & Minuman

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
28	Mayora Indah Tbk	14.818.730.635.847	390.261.637.241
29	Nippon Indosari Corpindo Tbk	2.174.501.712.899	107.712.914.648
30	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	4.393.932.684.171	-177.575.035.200

b. Sub Sektor Rokok

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
31	Gudang Garam Tbk	70.365.573.000.000	-2.182.441.000.000
32	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	89.069.306.000.000	-3.569.336.000.000
33	Wisnilak Inti Makmur Tbk	1.839.419.574.956	46.881.830.192

c. Sub Sektor Farmasi

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	PPh Terutang
34	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk	2.218.536.000.000	-122.924.000.000
35	Kalbe Farma Tbk	17.887.464.223.321	-663.186.962.586
36	Darya Varia Laboratoria Tbk	1.306.098.136.000	-36.543.278.000

Sumber : Data Diolah dari website www.idx.co.id,2017

Dikarenakan penjualan merupakan unsur yang penting bagi perusahaan dan pajak juga merupakan pendapatan negara, hal ini menarik untuk diteliti karena secara logika penjualan bersih suatu perusahaan mempengaruhi besarnya pajak bagi penerimaan negara. Seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang perlu diteliti agar dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan secara komersial maupun

fiskal tentang seberapa besar industri manufaktur yang dikerjakan mempengaruhi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian ini menganalisis Bagaimana pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan tersebut, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perolehan penjualan bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana perolehan beban komersial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai bahan dalam penulisan skripsi Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Selain itu juga, sebagai upaya pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan, sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah yang terbaik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam permasalahan yang terjadi dalam latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perolehan penjualan bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan perolehan beban komersial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. **Kegunaan Teoritis**

Merupakan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan terkait pada perhitungan pajak penghasilan terutang pada perusahaan *go public* khususnya mengenai pengaruh penjualan bersih dan beban komersial yang terhadap pajak penghasilan terutang. Penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu media informasi dan referensi untuk penelitian lainnya yang relevan.

2. **Kegunaan Praktis**

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa masukan yang dapat berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan (Sofyan, 2013:201). Menurut (Budi, 2009:1) laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di luar perusahaan atau yang umumnya disebut stakeholder. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) pada paragraf ke 7 tahun 2012, disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan informasi formal dan terstruktur atas operasional suatu perusahaan dan memberikan petunjuk atas penetapan kebijakan di masa yang akan datang, namun perusahaan harus membuat dua macam laporan keuangan yakni laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal sebagaimana digunakan untuk keperluan perpajakan harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi keuangan yang baku. Sebagai wadah satu-satunya bagi profesi akuntansi di Indonesia, maka hanya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berhak menyusun dan merevisi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara signifikan. Standar akuntansi yang kini berlaku di Indonesia terangkum dalam buku Standar Akuntansi tahun 2015.

Adapun tujuan standar akuntansi yang baku adalah:

- a. Dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.
- b. Memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan.

- c. Memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan makro lainnya.
- d. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan prinsip akuntansi.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 tahun 2015 di antaranya untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.1.3. Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 paragraf 7 tahun 2015, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang utama hanya tiga yaitu berupa daftar neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas.

2.1.3.1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time, sering disebut per tanggal tertentu misalnya per tanggal 31 Desember 2015. Posisi yang digambarkan ini memang timbul sebagai akibat dari konsep *double entry accounting system* yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan.

Ada tiga komponen dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

1. Definisi Aset

Menurut FASB (1985) definisi aset adalah sebagai berikut: "Aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu."

2. Definisi Liabilitas

Liabilitas adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi (saldo kredit bukan akibat saldo negatif aktiva).

FASB mendefinisikan liabilitas sebagai berikut: "Liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang yang timbul akibat

kewajiban perusahaan sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi.”

3. Definisi Ekuitas

Ekuitas adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga (entity) setelah dikurangi liabilitasnya. Dalam perusahaan, ekuitas adalah modal pemilik.

2.1.3.2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah penjelasan lengkap dan lebih rinci tentang perhitungan laba rugi ini. Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk menyusun laporan ini maka kita perlu mengetahui mana yang termasuk hasil dan mana yang termasuk biaya. Ada lima komponen laporan laba rugi, yaitu:

1. Hasil (*Revenue*)

Menurut FASB, *revenue* adalah:

“*Revenue* adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan.”

Definisi *revenue* Menurut PSAK No.23 tahun 2015 adalah:

“Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty dan sewa.”

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.

2. Beban (*Expense*)

Biaya (*cost*) sering diartikan sama dengan beban, biaya (*cost*) yaitu suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (*expense*) yaitu arus keluar barang atau jasa yang dapat dibandingkan dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*). Karena pengorbanan tersebut digunakan untuk menghasilkan “prestasi” dan tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang, maka harus dikurangkan dari laba pada periode yang bersangkutan. FASB mendefinisikan beban (*expense*) sebagai:

“Arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.”

Menurut PSAK No.23 paragraf 18 tahun 2015 pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara bersamaan, proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan

beban (*matching revenue and expense*). Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan andal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang telah diterima untuk penjualan barang tersebut diakui sebagai suatu kewajiban.

3. Laba/Rugi usaha

FASB mendefinisikan accounting income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (*net asset*) dari suatu entity selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang bukan berasal dari pemilik. Laba usaha (*operating profit*) merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari aktivitas usaha atau operasinya, sebelum dikenai biaya/beban pinjaman dana (*cost funding*) dari kreditur, baik berupa biaya bunga dari obligasi atau utang jangka panjang.

4. Pendapatan dan Beban lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain ini adalah pendapatan atau beban yang diperoleh bukan dari usaha utama perusahaan sesuai dengan maksud mendirikan perusahaan tersebut.

a. Pendapatan lain-lain

Pendapatan ini merupakan tambahan dana yang memberikan penghasilan bagi perusahaan berasal dari penerimaan dividen atas investasi atau penyertaan berupa kepemilikan saham perusahaan lain, dan bunga yang diterima oleh perusahaan dari simpanan uang di bank.

b. Beban lain-lain

Beban lain-lain biasanya berupa beban bunga, yaitu bunga pinjaman. Bila perusahaan mengeluarkan dividen atau mengeluarkan obligasi, maka bunga harus dibayarkan kepada pemegang obligasi karena perusahaan telah menggunakan uang yang diterima dari obligasi yang dikeluarkan perusahaan. Beban lain bisa juga berupa bunga yang harus dibayar atas pinjaman/utang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lain.

2.1.3.3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas membuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas membantu para investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk:

- a. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas dimasa yang akan datang.
- b. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar dividend an keperluan dana untuk kegiatan ekstern.

- c. Menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- d. Menilai pengaruh investasi baik kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode.

2.1.4. Penjualan

Penjualan adalah sumber yang paling utama dari penghasilan, biasanya selalu ditempatkan pada baris pertama laporan laba rugi (Budi, 2009:48). Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi (Sofjan, 2013:23), bila produk telak laku dijual kepada pelanggan, maka pendapatan dilaporkan sebagai penjualan. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat terjadi apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual akan menghasilkan laba.

Penjualan merupakan satu diantara lima konsep bersaing yang dijadikan sebagai pedoman oleh oerorganisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran (Kotler, 2016:19). Lima konsep tersebut adalah konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan konsep pemasaran social. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan sedikit konsep penjualan, agar bahsan penelitian tetap fokus pada variabel-variabel penelitian yang diteliti dan tidak terlalu meluas.

Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis, jika dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu, organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif.

Penjualan barang secara tunai maupun kreddit dicatat dengan mengkredit penjualan. Harga Pokok Penjualan (HPP) barang yang dijual juga dicatat atas penjualan tersebut. dalam penjualan barang secara kredit memungkinkan diberikannya diskon penjualan untuk pembayaran yang lebih cepat oleh pelanggan, diskon penjualan ini dicatat oleh penjual sebagai debet ke diskon penjualan. Diskon penjualan dilaporkan sebagai pengurang terhadap penjualan, begitupun dengan pengembalian barang (retur) atau potongan harga diberikan. Bila barang dikembalikan atau potongan harga diberikan, maka penjualan mendebet retur dan potongan penjualan. Jadi penjualan bersih adalah jumlah yang diterima dari penjualan setelah dikurangi dengan nilai barang yang dikembalikan dan cadangan turunnya harga (Budi, 2009:48).

2.1.5. Beban Komersial

Beban (*expense*) yaitu arus keluar barang atau jasa yang dapat ditandingkan dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*). Karena pengorbanan tersebut digunakan untuk menghasilkan “prestasi” dan tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang, maka harus dikurangkan dari laba pada periode yang bersangkutan.

Beban komersial merupakan total beban yang terjadi dalam keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha dan beban lain-lain. Beban pokok penjualan. (Novia, 2008:20).

1. Beban Pokok Penjualan

Pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang, harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) meliputi semua biaya yang ada dalam perusahaan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Biaya tersebut termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan *overhead* pabrik seperti supervise, sewa, listrik perawatan, dan perbaikan (Budi, 2009:48).

2. Beban usaha

Beban usaha (*operating expenses*) perusahaan terdiri atas biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan juga biaya penyusutan aktiva tetap (Budi, 2009:49).

a. Biaya penjualan

Biaya penjualan biasanya dikelompokkan tersendiri sehingga pembaca perhitungan laba-rugi dapat melihat cakupan dari biaya-biaya penjualan tersebut. misalnya gaji dan komisi untuk waraniaga (*salesman*), biaya iklan dan promosi, dan biaya perjalanan dinas waraniaga merupakan biaya penjualan.

b. Biaya Administrasi dan Umum

Biaya ini meliputi biaya gaji pimpinan perusahaan, gaji dan upah karyawan, biaya kantor, listrik, air, telepon, alat tulis kantor, perawatan dan perbaikan, asuransi dan sejenisnya.

c. Penyusutan

Penyusutan merupakan nilai penyusutan dari penggunaan suatu aktiva disebabkan keusangan atau keausan. Misalnya penurunan nilai per tahun untuk mesin yang digunakan untuk proses pabrikasi adalah suatu biaya yang harus dikurangkan sebagai tambahan pengeluaran.

3. Beban Lain-lain

Beban lain-lain biasanya berupa beban bunga, yaitu bunga pinjaman. Bila perusahaan mengeluarkan atau mengeluarkan obligasi, maka bunga harus dibayarkan kepada pemegang obligasi karena perusahaan telah menggunakan uang yang diterima dari obligasi yang dikeluarkan perusahaan. Beban lain bisa

juga berupa bunga yang harus dibayar atas pinjaman/utang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lain.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalah secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro Rochmat yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1), definisi pajak yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi lainnya, menurut Prof Dr. MJH. Smeets Agoes dan Esterlita Trisnawati (2014:4) yang dikutip oleh Gracia Stephani Lauwrensius, Siti Khairani, dan M. Ridhwan yang menyatakan bahwa pajak adalah prestitusi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R, yaitu :

Tax is a diversion from the private sector to government sector, not as a result of violations of the law, but must be carried out, under the terms defined in advance, without obtaining the benefits directly and proportionately, so that the government can carry out its duties to run the government.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2015:1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari segi ekonomi menurut Erly Suandy (2011:1), “Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (peusahaan) ke sektor publik”.

Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suady (2011:1) :

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun berjalan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2016:155)

Menurut Siti Resmi (2015:74) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa :

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;
Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
2. Badan;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan perkumpulan terdiri dari asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Menurut Undang-Undang PPh Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan,

berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Dalam peraturan perpajakan yang dimaksud dengan objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5. Tarif PPh WP Badan

Tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

1. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh
Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.
2. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh
Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010 tarif untuk WP Badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan; dan
 - c. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Tarif Pasal 31E UU PPh.
Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010).

WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan ‘peredaran bruto’ adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.

Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen). (<http://pajak.go.id>. Diakses pada 18 September 2016)

2.2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Untuk mendapatkan laba fiskal, terlebih dahulu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dipengaruhi oleh factor beda tetap dan beda temporer.

a. Beda tetap

Perbedaan tetap timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara pelaporan komersial dan fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

b. Beda temporer

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang (Waluyo, 2016:214-215).

Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba/*profit*. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Bagi wajib pajak (khususnya Badan) penghasilan kena pajak dihitung dengan perhitungan biasa. contoh:

Peredaran bruto	Rp XXX	
Biaya untuk mendapatkan,menagih, dan		
Memelihara penghasilan		Rp XXX (-)
Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp XXX
Penghasilan lainnya	Rp XXX	
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan		
Memelihara penghasilan lainnya tersebut	Rp XXX (-)	
		Rp XXX (+)
Jumlah seluruh penghasilan neto		Rp XXX
Kompensasi kerugian		Rp XXX (-)
Penghasilan Kena Pajak (bagi wajib pajak badan)		Rp XXX

Jumlah penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak penghasilan terutang (PKP x tarif PPh).

2.3. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan peneliti terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh penjualan dan beban komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Andy Azhari (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015) Penelitian ini sudah dipublikasikan tahun 2010 di <http://repository.uinjkt.ac.id> dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada Perusahaan penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014”). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif. Dengan simpulan penelitian bahwa hasil pengujian secara simultan atau uji secara simultan atau uji F dihasilkan bahwa *long term debt to asset ratio*, *Debt to equity ratio* dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada taraf signifikansi 0,001 dengan alpha 5% atau $0,001 < 0,05$. selanjutnya untuk pengujian secara parsial atau uji t dari ketiga variabel independen ditemukan bahwa hanya variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* yang berpengaruh secara signifikan dan terhadap variabel dependen Penghasilan badan terutang pada taraf signifikansi 0,023 dengan alpha 5% atau $(0,023 < 0,05)$. Sedangkan variabel t Eoquity Ratio dan variabel manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.
2. Endah Nilam Rahmadani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010) Penelitian ini sudah dipublikasikan tahun 2010 di <http://repository.uinjkt.ac.id> dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Penelitian ini menganalisis apakah *longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan, Penelitian mengambil sampel pada perusahaan yang terdaftar di BEI dari 2005 sampai dengan 2009, Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17. Hasil pengujian F dihasilkan bahwa *longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan untuk uji t *longterm debt to asset ratio* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan, menyatakan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.

3. Nindri Putri Astrini (Universitas Pakuan, 2015) melakukan Penelitian dengan judul Pengaruh Modal Sendiri dan Utang Jangka Panjang Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perkembangan DAR dan DER pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk mengetahui perkembangan PPh badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta untuk mengetahui pengaruh DAR dan DER terhadap PPh badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lokasi Penelitian adalah perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia, metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diakses melalui www.idx.co.id. Penarikan sampel yang digunakan yaitu *Purposive sampling*. Data analisis dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian yaitu 1) *Debt to asset ratio (DAR)* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan *Debt to equity ratio (DER)* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. 2) *Debt to asset ratio (DAR)* dan *Debt to equity ratio (DER)* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
4. Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (Universitas Pakuan, JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi). Volume 1 No. 2 : Hal. 21-31 E-ISSN : 2502-4159). Penelitian ini sudah dipublikasikan tahun 2015 di <http://ejournal.unpak.ac.id> dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013. Penelitian ini menganalisis apakah *longterm debt to asset ratio (LDAR)* dan *debt to equity ratio (DER)* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Metode pengolahan data yaitu dengan analisis deskriptif statistik dengan alat analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai variabel LDAR yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,384 > 2,229$ maka H_0 ditolak yang berarti LDAR secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Untuk nilai variabel DER yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,350 > 2,229$ maka H_0 ditolak yang berarti DER secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pengujian secara simultan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $6,931 > 2,816$ artinya LDAR dan DER secara simultan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, (2) DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, dan (3) LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

5. Siti Nurjanah (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008) Penelitian ini sudah dipublikasikan tahun 2012 di <http://repository.uinjkt.ac.id> melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Beban Terhadap Pajak: Laba Sebelum Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45). Penelitian ini menganalisis Pengaruh pendapatan dan beban terhadap pajak laba sebelum pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil langsung dari laporan keuangan tahun periode 2003-2007 di website BEI dengan LQ45 sebagai populasi dan 40 perusahaan sebagai sampelnya. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah: (a) terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan dan koefisien yang negatif dari pendapatan ke pajak, sedangkan ada pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif dari pendapatan ke pajak melalui laba sebelum pajak sebagai variabel intervening. (b) terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan dan koefisien yang negatif dari beban ke pajak, pajak melalui laba sebelum pajak sebagai variabel intervening. Penggunaan laba sebelum pajak sebagai variabel intervening adalah tepat.
6. Nur Wachidah Yulianti (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008) Penelitian ini sudah dipublikasikan tahun 2012 di <http://repository.uinjkt.ac.id> melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAR dan DER terhadap PPh badan terutang. Lokasi Penelitian adalah perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif. Data analisis dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel DER memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang dan variabel DAR tidak memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang sehingga jika perusahaan ini meningkatkan atau menurunkan DAR nya maka tidak akan membawa dampak apapun bagi PPh Badan Terutang.

2.4. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan suatu pencerminan dari suatu kondisi perusahaan, karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang bersangkutan pada periode tertentu.

Bagian di dalam laporan keuangan yang mendapat perhatian khusus adalah laba. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 2 (FASB 1987) merupakan unsur utama dalam

laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Kemudian dijelaskan pula pada Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 2012, laba merupakan kinerja penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih adalah penghasilan dan beban.

Definisi penghasilan (*income*) menurut KDPPLK tahun 2012 meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalty dan sewa. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menjelaskan pendapatan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan yang biasa disebut penjualan. Dalam melakukan penjualan, adakalanya perusahaan harus menerima pengembalian barang dari pelanggan maupun memberikan potongan atau diskon terhadap penjualan barang, setelah penjualan awal dikurangi dengan faktor-faktor pengurang penjualan barulah diperoleh penjualan bersih.

Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual akan menghasilkan laba.

Untuk mendapatkan laba sebelum pajak, maka penjualan bersih harus dikurangkan terlebih dahulu dengan total beban perusahaan yakni yang disebut beban komersial dan ditambah dengan penghasilan lain-lain. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan ditambah beban usaha, dan beban lain-lain. Beban usaha yaitu jumlah beban penjualan ditambah jumlah beban umum dan beban administrasi perusahaan.

Dalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) laba yaitu laba akuntansi dan laba fiskal yang menjadikan perlu dilakukan penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba melalui rekonsiliasi. Merekonsiliasi atau koreksi harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut PSAK 46 tahun 2015 perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat adanya koreksi fiskal dapat berupa perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan waktu sementara/temporer (*timing temporary differences*). Rekonsiliasi atau koreksi fiskal dilakukan untuk menentukan jumlah pajak terutang. Pajak penghasilan terutang ini sama dengan pajak kini yang penyajiannya pada laporan laba rugi komprehensif.

Pada umumnya manajemen perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil sehingga mereka melaporkan laba bersih yang kecil, besarnya beban komersial dapat mengurangi beban pajak kini atau Pajak Penghasilan terutang yang dihitung

atas penghasilan kena pajak. Berbicara mengenai pajak berarti berbicara mengenai pengeluaran yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, karena penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu pajak penghasilan yang juga membantu dalam pengoptimalisasian pendapatan nasional jika dibantu oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

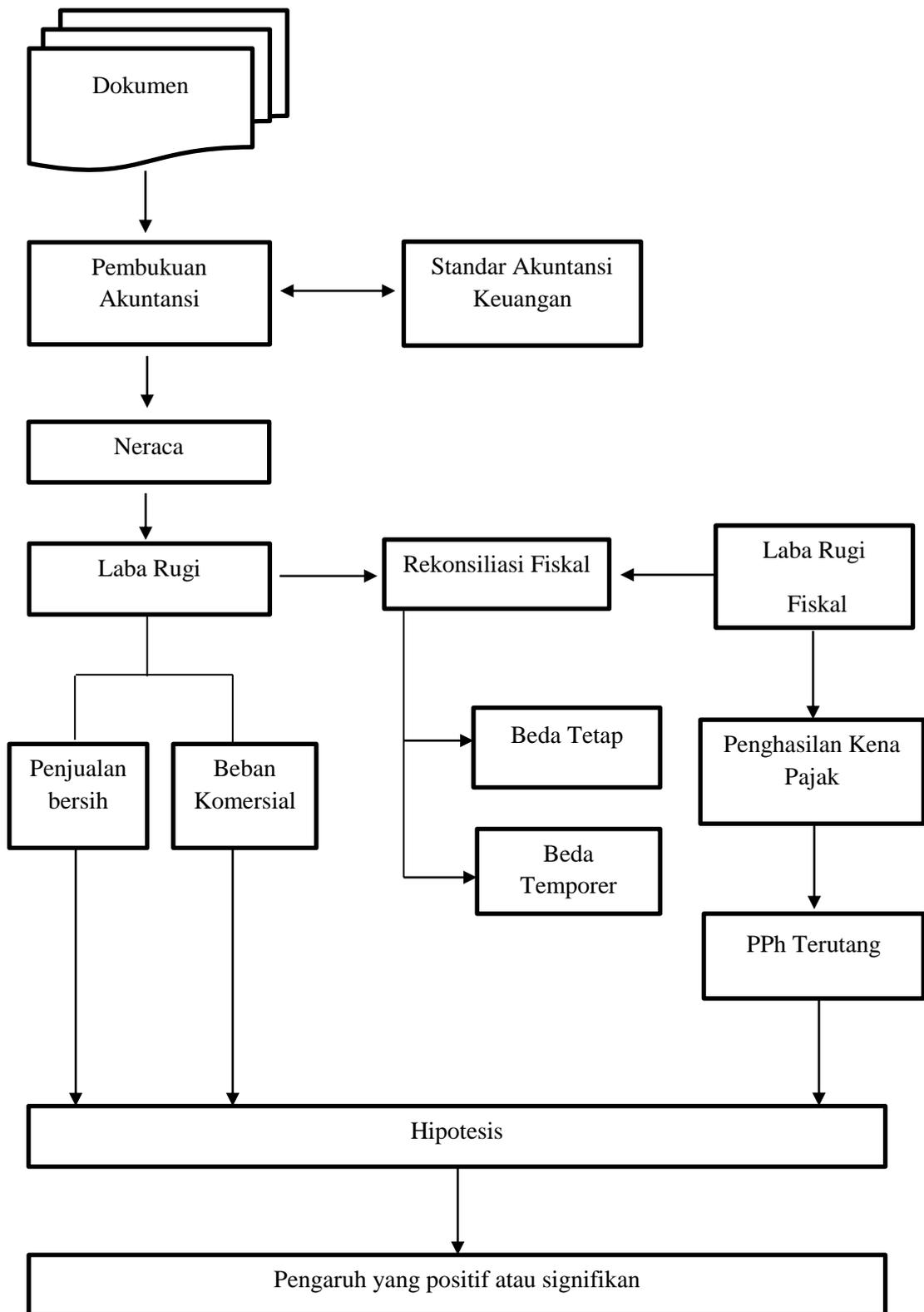
Penelitian ini mengasumsikan bahwa dengan meningkatnya penjualan dan menurunnya beban komersial akan membawa pengaruh terhadap pajak penghasilan terutang, diharapkan dengan bertambahnya penjualan, serta berkurangnya beban komersial akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga akan menambah pendapatan negara dari aspek perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran pada Gambar 1.

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Penjualan bersih berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang
- H2 : Beban komersial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang
- H3 : Penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang.



Gambar 1
Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang berupa angka pada laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel penelitian yang terdiri dari penjualan bersih dan beban komersial dengan pajak penghasilan terutang.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah penjualan bersih, beban komersial, dan pajak penghasilan terutang.

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi, yakni unit analisis yang sumber datanya merupakan respon dari divisi organisasi/ perusahaan.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data yang akan diuji adalah laporan laba rugi perusahaan yang berakhir 31 Desember untuk tahun 2014 dan 2015.

3.3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian, yaitu sebagai berikut:

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Menurut Sugiyono (2009:61), variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau dengan kata lain variabel independen menjadi sebab terhadap terjadi atau tidak terjadinya sesuatu dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan variabel

dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel independen (variabel bebas)
Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau dengan kata lain variabel independen menjadi sebab terhadap terjadi atau tidak terjadinya sesuatu dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah penjualan bersih dan beban komersial.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pajak penghasilan terutang.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel Independen (X) :			
1. Penjualan Bersih (X1)	1. Penjualan kotor 2. Retur penjualan 3. Potongan penjualan	Penjualan kotor - Retur penjualan - Potongan penjualan	Rasio
2. Beban Komersial (X2)	1. Beban Pokok Penjualan 2. Beban Usaha 3. Beban lain-lain	Beban Pokok Penjualan + Beban usaha + Beban lain-lain	Rasio
Variabel dependen (Y): Pajak Penghasilan terutang	Pajak kini	Laba fiskal x tarif pajak penghasilan	Rasio

3.5. Metode Penarikan sampel

Dalam penelitian ini metode penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan pada tahun 2014 dan 2015.

Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan untuk dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2014 dan tahun 2015 secara lengkap dan dalam satuan mata uang rupiah.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan berakhir setiap tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan manufaktur memiliki penghasilan kena pajak (laba fiskal) sehingga mempunyai Pajak Penghasilan terutang, artinya Pajak Penghasilan terutang itu tidak nihil.

Tabel 4
Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia

1. Sektor Industri Dasar & Kimia

a. Sub Sektor Semen

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk

b. Sub Sektor Keramik, Porselin&kaca

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
3	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
4	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk

c. Sub sektor Logam &sejenisnya

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
5	BTON	Beton jaya Manunggal Tbk
6	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
7	LION	Lion Metal Works Tbk
8	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk

d. Sub Sektor Kimia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
9	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
10	SRSN	Indo Acidatama Tbk
11	EKAD	Ekadharna International Tbk
12	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
13	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

e. Sub sektor Plastik & Kemasan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
14	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk
15	TRST	Trias Sentosa Tbk
16	BRNA	Berlina Tbk

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
17	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
18	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk

g. Sub sektor pakan ternak

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
19	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
20	MAIN	Malindo Feedmill Tbk

2. Sektor aneka industry

a. Sub Sektor Tekstil dan Garment

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
21	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
22	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
23	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk

b. Sub Sektor Kabel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
24	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
25	JECC	Jembo Cable Company Tbk

c. Sub sektor otomotif & komponen

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
26	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk
27	BOLT	Garuda Metalindo Tbk

3. Sektor barang konsumsi

a. Sub Sektor Makanan & Minuman

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
28	MYOR	Mayora Indah Tbk
29	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
30	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

b. Sub Sektor Rokok

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
31	GGRM	Gudang Garam Tbk
32	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
33	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

c. Sub Sektor Farmasi

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
34	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk
35	KLBF	Kalbe Farma Tbk
36	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk

Sumber : www.idx.co.id,2017

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*).
Penulis memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai sumber (buku, jurnal, skripsi, internet dan perangkat lain) dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.
- b. Teknik observasi
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sehingga prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.7. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data-data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan. Dalam mengolah data penelitian, penulis menggunakan aplikasi *Statistic Product Service Solution (SPSS)* versi 21.0. alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan data tentang keterkaitan antara variabel dengan menyajikan angka-angka yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian jenis ini digunakan untuk menguji asumsi, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik mencakup:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parasimetrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal *P Plot*, uji *Chi Square*, *skewness* dan kurtosis atau uji *Kolmogrov-Smirnov*. Data yang

terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model regresi yang baik adalah jika data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka indikasi terjadi multikolinearitas. Tidak adanya nilai korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat terjadi karena kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua variabel ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi. Batasan umum yang digunakan untuk mengukur multikolinearitas adalah $tolerance < 0.1$ dan nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji *Durbin-Watson* (DW test). Hasil kesimpulan ada atau tidaknya autokorelasi adalah berdasarkan:

- a. $DU < DW < 4-DU$ berarti tidak ada autokorelasi.
- b. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ berarti ada autokorelasi positif.
- c. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED. Dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ yang sudah di *studentized*). Dasar analisis ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka diidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji t adalah:

- a. Merumuskan hipotesis. Hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial..
- b. Pilih taraf nyata tingkat signifikansi (α)
Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
- c. Melakukan uji t dengan dasar probabilitas

Hipotesis ditolak apabila nilai $P > 0.05$

Hipotesis diterima apabila nilai $P < 0.05$

- d. Jika t hitung yang diperoleh dari hasil pengamatan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan dependen.
- e. Jika t hitung yang diperoleh dari hasil pengamatan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan dependen

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat signifikansi F

dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- a. Merumuskan hipotesis. Hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α)
Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
- c. Melakukan uji F dengan berdasarkan probabilitas.
Hipotesis ditolak apabila $P > 0.05$
Hipotesis diterima apabila $P < 0.05$
- d. Jika F hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pegraruh simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- e. Jika F hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegraruh simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bliia $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pajak Penghasilan terutang

a = Konstanta

b_1 b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Penjualan Bersih

X_2 = Beban komersial

e = *Error Term*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya yang bergerak dibidang manufaktur, dimana perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk siap jual kepada masing-masing pelanggan yang sifatnya sangat berbeda dengan bahan bakunya. (Sanwanih,2006:49). Dengan kata lain, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjalankan proses pembuatan produk. Tujuan perusahaan manufaktur yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria ada sebanyak 36 perusahaan manufaktur dengan 72 laporan keuangan berupa laporan laba rugi, yang terdiri dari 36 laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2014 dan 36 laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2015.

Tabel 5
Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia

4. Sektor Industri Dasar & Kimia

h. Sub Sektor Semen

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk

i. Sub Sektor Keramik, Porselin&kaca

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
3	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
4	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk

j. Sub sektor Logam &sejenisnya

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
5	BTON	Beton jaya Manunggal Tbk
6	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
7	LION	Lion Metal Works Tbk
8	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk

k. Sub Sektor Kimia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
9	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
10	SRSN	Indo Acidatama Tbk
11	EKAD	Ekadharna International Tbk
12	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
13	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

l. Sub sektor Plastik & Kemasan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
14	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk
15	TRST	Trias Sentosa Tbk
16	BRNA	Berlina Tbk

m. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
17	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
18	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk

n. Sub sektor pakan ternak

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
19	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
20	MAIN	Malindo Feedmill Tbk

5. Sektor aneka industry

d. Sub Sektor Tekstil dan Garment

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
21	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk
22	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
23	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk

e. Sub Sektor Kabel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
24	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
25	JECC	Jembo Cable Company Tbk

f. Sub sektor otomotif & komponen

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
26	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk
27	BOLT	Garuda Metalindo Tbk

6. Sektor barang konsumsi

d. Sub Sektor Makanan & Minuman

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
28	MYOR	Mayora Indah Tbk
29	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
30	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

e. Sub Sektor Rokok

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
31	GGRM	Gudang Garam Tbk
32	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
33	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

f. Sub Sektor Farmasi

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
34	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk
35	KLBF	Kalbe Farma Tbk
36	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk

Sumber : www.idx.co.id,2017

Perusahaan-perusahaan yang terpilih sebagai sampel tersebut kemudian akan dianalisis pengaruhnya antara variabel independen (penjualan bersih dan beban komersial) terhadap variabel dependen (pajak penghasilan terutang).

4.1.1. Profil Perusahaan

1. Sektor Industri Dasar & Kimia

a. Sub Sektor Semen

1) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953. Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT Semen Gresik (Persero) tanggal 24 Oktober 1969. Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri persemenan. Lokasi pabrik semen Perseroan dan Entitas Anak (“Grup”) berada di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan dan Quang Ninh di Vietnam. Hasil produksi Grup dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 7 Agustus 1957. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero)Tbk didirikan Tanggal 14 November 1974, Perusahaan bergerak dibidang industri semen termasuk produksi,distribusi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan industri semen. Kantor Pusat Perusahaan terletak di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang. Lokasi pabrik yang dimiliki Perusahaan terdapat di tiga lokasi yaitu masing-masing di Baturaja, Palembang dan Panjang (Lampung). Fasilitas Pabrik di Baturaja meliputi pabrik penghasil terak (intermediate good) dengan kapasitas produksi 1.200.000 ton per tahun dan pabrik penghasil semen (cement mill) dengan kapasitas produksi semen curah 1.300.000 ton per tahun. Jumlah kapasitas ini diperoleh setelah selesainya proyek Cement Mill & Packer yang diselesaikan pada

akhir tahun 2013. Selain itu pabrik di Palembang dan Panjang meliputi pabrik penghasil semen dengan kapasitas produksi semen curah masing-masing 350.000 ton per tahun. Seluruh hasil produksi semen dipasarkan di pasar lokal yang meliputi wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Bengkulu. Selain kantor beroperasi di Baturaja, Palembang dan Panjang, Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan yang beralamat di Gedung Graha Irama Lantai 9 Ruang B - C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 1 Juni 1981.

b. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

1) PT Arwana Citramulia Tbk

PT Arwana Citramulia Tbk didirikan dengan nama PT Arwana Citra Mulia Santoso No. 21 tanggal 22 Februari 1993, yang telah diubah berdasarkan akta notaris Imam Santoso, S.H., No. 147 tanggal 26 Oktober 1993 dan No. 105 tanggal 15 November 1993, antara lain mengenai perubahan nama Perusahaan menjadi PT Arwana Citramulia. ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri keramik dan menjual hasil produksinya di dalam negeri. Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 24, Kembangan, Jakarta Barat dan pabriknya berlokasi di Jatuwung, Tangerang, Banten. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Juli 1995. PT Suprakreasi Eradinamika adalah entitas induk terakhir dari Perusahaan dan Entitas Anaknya (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”).

2) PT Asahimas Flat Glass Tbk

Perseroan didirikan tanggal 7 Oktober 1971. Perseroan bergerak dalam bidang industri kaca, ekspor dan impor, dan jasa sertifikasi mutu berbagai jenis produk kaca serta kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha tersebut. Operasi komersial Perseroan dimulai pada bulan April 1973. Perseroan berdomisili di Indonesia dengan Kantor Pusat di Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Jakarta Utara. Pabrik Perseroan berlokasi di Kawasan Industri Ancol, Jakarta Utara; di Bukit Indah Industrial Park, Cikampek; dan di Tanjung Sari, Sidoarjo, Jawa Timur.

c. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

1) PT Betonjaya Manunggal Tbk

PT Betonjaya Manunggal Tbk. didirikan pada tanggal 27 Pebruari 1995. Kantor pusat dan pabrik Perusahaan beralamat di Jl. Raya Krikilan No. 434, Km 28 Driyorejo - Gresik, Jawa Timur. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1996 dan saat ini bergerak

dalam bidang industri besi beton yang dipasarkan di dalam negeri. Pemegang saham terbesar perusahaan adalah Profit Add Limited (entitas yang didirikan di Samoa) dan Positive Mind Limited (entitas yang didirikan di Samoa). Profit Add Limited merupakan entitas anak dari Marston International Limited (entitas yang didirikan di British Virgin Island) dan Positive Mind Limited merupakan entitas anak dari Meriton International Limited (entitas yang didirikan di Samoa).

2) **PT Indal Aluminium Industry Tbk**

PT Indal Aluminium Industry Tbk didirikan tanggal 16 Juli 1971 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Kantor pusat Indal terletak Jl. Kembang Jepun No. 38-40, Surabaya 60162, sedangkan pabrik berlokasi di Kompleks Maspion Unit-1, Sawotratap Sidoarjo – 61254 dan Kawasan Industri MM – 2100 Jl. Selayar Blok A – 7 Bekasi – 17849.

Indal tergabung dalam Maspion Group. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indal Aluminium Industry Tbk adalah PT Husin Investama (32,98%), PT Marindo Investama (7,84%), PT Prakindo Investama (6,27%), PT Guna Investindo (6,27%), PT Mulindo Investama (6,27%), PT Maspion (7,62%) dan Haiyanto (10,72%).

Ruang lingkup kegiatan INAI terutama adalah bidang manufaktur aluminium sheets, rolling mill, dan extrusion plant. Kegiatan produksi INAI adalah mengolah bahan bak aluminium ingot menjadi aluminium ekstrusion profil yang banyak digunakan dalam industri konstruksi, peralatan rumah tangga, komponen elektronik/otomotif dan sebagainya.

3) **PT Lion Metal Works Tbk**

PT Lion Metal Works didirikan pada bulan Agustus 1972 di Jakarta. lingkup kegiatan Perseroan meliputi industri peralatan kantor dan pabrikasi lainnya dari logam. Saat ini, kegiatan utama Perseroan adalah memproduksi peralatan kantor, peralatan gudang, bahan bangunan dan konstruksi dan pabrikasi lainnya dari logam seperti lemari arsip (*filing cabinet*), lemari penyimpanan; pintu besi; perlengkapan gudang, seperti rak tingkat dan pallet; penyangga kabel (*cable ladder*) dan lainnya. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Perseroan berkedudukan di Jalan Raya Bekasi, Km. 24,5, Cakung, Jakarta Timur.

4) **PT Pelangi Indah Canindo Tbk**

Pelangi Indah Canindo mulai mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1983 sebagai produsen *pail can* dan *general can* dalam berbagai ukuran. Tahun 1990 Pelangi Indah Canindo mengembangkan produk *steel drum* untuk kebutuhan industri.

Perkembangan yang terus meningkat mendorong Pelangi Indah Canindo untuk mendiversifikasi basis industrinya pada produk tabung LPG (*cylinder tank*) pada tahun 1994. Tahun 2000, mulai mengekspor ke Australia, Vietnam, Bangladesh dan negara-negara lainnya. Selanjutnya pada Tahun 2006, Pelangi Indah Canindo mulai memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk keperluan program koversi gas yang mulai dicanangkan pemerintah Indonesia. Pelangi Indah Canindo juga akan mengembangkan basis industrinya pada sektor *oil and gas* dengan penyediaan infrastruktur, jasa penyimpanan, pengisian dan distribusi gas LPG serta DME (Dimethyl Ether).

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km 14 No.700 Jakarta dan memiliki pabrik yang berlokasi di Cimone, Cikupa dan Balaraja (Tangerang) serta Cilacap. Perusahaan mulai beroperasi komersil pada tahun 1984.

d. Sub Sektor Kimia

1) PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

PT Duta Pertiwi Nusantara didirikan tanggal 18 Maret 1982. Perusahaan berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Kantor Pusat beralamat di Jl. Tanjungpura No. 263D, Pontianak 78122. Sedangkan pabrik berlokasi di Jl. Adisucipto Km. 10,6 Desa Teluk Kapuas, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Pontianak 78391. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri lem, barang-barang kimia dan pertambangan. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1987. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam negeri. Pada periode laporan yang disajikan tidak terdapat ekspansi maupun penciutan usaha. Untuk entitas anak yang berusaha dalam industri pertambangan batubara sampai saat ini dalam tahap mempersiapkan rencana eksplorasi dan survey serta belum memproduksi.

2) PT Indo Acidatama Tbk

PT Indo Acidatama Tbk, didirikan pada awalnya bernama PT Sarasa Nugraha Tbk Tanggal 7 Desember ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri pakaian jadi, kimia dasar, kemasan dari plastik dan perdagangan ekspor dan impor. Pada saat ini, kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang industri kimia dasar. Perusahaan berkedudukan di Gedung Graha Kencana Suite 9A, Jl. Raya Perjuangan 88, Jakarta. Perusahaan memiliki pabrik yang berlokasi di Surakarta dengan alamat Jl. Raya Solo, Sragen Km 11 Desa Kemiri, Jawa Tengah. Perusahaan memulai kegiatan komersil kimia dasar sejak tahun 1989.

Perusahaan tidak mempunyai entitas induk karena tidak terdapat pemegang saham Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan efektif atau hak suara melebihi 50%. Pada tanggal laporan, South East Union Inc, PT Budhi Bersaudara Manunggal, dan PT Kemiri Sarana Investama merupakan entitas yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap Perusahaan, dan tidak terdapat pihak pengendali.

3) PT Ekadharma International Tbk

PT Ekadharma International Tbk, didirikan dengan nama PT Ekadharma Widya Graphika tanggal 20 November 1981. Pada tahun 2006, nama Perusahaan diubah menjadi PT Ekadharma International Tbk. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang pembuatan pita perekat dan memproduksi bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan serta usaha perdagangan pada umumnya. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, dengan kantor pusat dan pabrik di Kawasan Industri Pasar Kemis Blok C-1, Tangerang. Saat ini, Perusahaan mempunyai kantor cabang di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, Cikarang, Makassar, Denpasar, Palembang, Bogor, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Pekanbaru, Batam dan Manado. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1981.

4) PT Budi Starch & Sweetener Tbk

PT Budi Starch & Sweetener Tbk, didirikan tanggal 15 Januari 1979. Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut Grup) didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Sungai Budi. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur bahan kimia dan produk makanan, termasuk produk turunan yang dihasilkan dari ubi kayu, ubi jalar, kelapa sawit, kopra dan produk pertanian lainnya dan industri lainnya khususnya industri plastik. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam pembuatan dan penjualan tepung tapioka, sweeteners (glukosa, fruktosa, sorbitol dan maltodextrin), karung plastik, asam sulfat dan bahan-bahan kimia lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Wisma Budi lantai 8-9, Jalan HR. Rasuna Said Kav C-6, Jakarta. Lokasi Pabrik Perusahaan di Subang, Lampung, Madiun, Surabaya dan Makasar. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1981.

5) PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk didirikan 7 Februari 1983. Perseroan menyewakan mesin dan peralatan yang menunjang kegiatan produksi Perseroan dan afiliasinya dan menjalankan kegiatan usaha

perdagangan besar. Perseroan bergerak di bidang perindustrian (sorbitol, dextrose monohydrate, maltodextrine, maltose dan hydrogen), perdagangan umum dan jasa, dan menyediakan fasilitas produksi, pemrosesan dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sejenis, memasarkan hasil industri ke dalam dan luar negeri, memberikan jasa konsultasi manajemen bisnis, menyewakan mesin dan peralatan, dan sebagai agen atau perantara (makelar) yang menerima komisi. Perseroan dan pabriknya berdomisili di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Jawa Timur, dan memiliki pula pabrik tepung tapioka berlokasi di Lampung. Perseroan juga memiliki kantor perwakilan di Wisma 46 Kota BNI, Jakarta. Perseroan telah memulai kegiatan operasi komersialnya sejak 1987.

e. Sub Sektor Plastik & Kemasan

1) PT Kageo Igar Jaya Tbk

PT Champion Pacific Indonesia Tbk, d/h PT Kageo Igar Jaya Tbk, didirikan dengan nama PT Igar Jaya Tbk tanggal 30 Oktober 1975. Ruang lingkup kegiatan Entitas terutama bergerak dalam bidang industri wadah dan kemasan dari bahan plastik (seperti botol plastik, tabung-tabung suntik dan tempat kosmetika) yang digunakan untuk keperluan industri farmasi, makanan dan kosmetika, perdagangan, pengangkutan, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik dan jasa atau pelayanan. Entitas memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1977 dan saat ini Entitas hanya menghasilkan pendapatan dari entitas anak. PT Kingsford Holdings merupakan entitas induk mayoritas dalam kelompok usaha Entitas. Entitas berdomisili di Jalan Raya Sultan Agung Km.28,5, Bekasi.

2) PT Trias Sentosa Tbk

PT Trias Sentosa Tbk didirikan tanggal 23 November 1979. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain bergerak dalam bidang industri dan perdagangan polypropylene dan polyester films. Perusahaan dan pabriknya berlokasi di Jl. Raya Waru 1B, Waru, Sidoarjo dan Desa Keboharan Km. 26, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1986.

3) PT Berlina Tbk

PT Berlina Tbk didirikan tahun 1970. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Jababeka Raya Blok E No. 12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Perusahaan mempunyai pabrik yang berlokasi di Pandaan (Jawa Timur), Tangerang (Banten) dan

Cikarang (Jawa Barat). Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi industri plastik dan industri lainnya yang menggunakan bahan pokok plastik dan fiberglass. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1970. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan luar negeri. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha yang dimiliki oleh PT Dwi Satrya Utama yang merupakan entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan.

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

1) PT Alkindo Naratama Tbk

PT Alkindo Naratama Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 31 Januari 1989. Perusahaan bergerak di bidang industri honey comb, edge protector, papercore dan papertube. Perusahaan memulai produksi komersialnya pada tahun 1994. Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Cimareme, Bandung.

2) PT Kedawung Setia Industrial Tbk

PT Kedawung Setia Industrial Tbk (“Perseroan”) dahulu didirikan dengan nama PT Kedawung Setia Industrial Ltd., pada tanggal 9 Januari 1973. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Kedawung Setia Industrial Ltd. dilakukan berdasarkan Akta Notaris Marsongko, S.H., No. 83 tanggal 20 November 1974, Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup aktivitas Perseroan meliputi:

- a. Industri barang-barang logam berlapis email, aluminium, dan barang-barang plastik dan kerajinan tangan terutama alat-alat dapur serta alat-alat rumah tangga yang dioperasikan secara elektronik.
- b. Pembangunan yang meliputi usaha rancang bangun dan pengembang real estate (belum dilaksanakan).
- c. Perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, dari semua barang yang dapat diperdagangkan.

Perseroan dan pabriknya berkedudukan di Jalan Mastrip 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Perseroan memulai produksi komersial pada tahun 1975.

g. Sub Sektor pakan ternak

1) PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 18 Januari 1971. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Milenia Lt. 7 Jl. MT. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo - Jawa Timur, Tangerang - Banten, Cirebon - Jawa Barat, Makasar - Sulawesi Selatan, Lampung, Padang - Sumatera Barat

dan Bati-bati - Kalimantan Selatan. Perusahaan dan entitas anak selanjutnya disebut “Grup”.

2) PT Malindo Feedmill Tbk

PT Malindo Feedmill Tbk (Perusahaan) didirikan pada tanggal 10 Juni 1997, Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah berusaha dalam bidang industri pakan ternak dan peternakan anak ayam usia sehari (day old chick). Perusahaan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 1998. Perusahaan berdomisili di Golden Plaza Fatmawati, Jalan RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan. Pabrik Perusahaan berada di daerah Jakarta, Banten dan Jawa sedangkan peternakan Perusahaan berlokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Entitas Anak berkedudukan di Jakarta sedangkan peternakan Entitas Anak berlokasi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dragon Amity Pte. Ltd, sebuah Perusahaan yang berkedudukan di Singapura, yang merupakan Induk langsung dari Perusahaan. Sementara Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah Leong Hup International Sdn. Bhd., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Malaysia.

3. Sektor Aneka Industry

a. Sub Sektor Tekstil dan Garment

1) PT Ricky Putra Globalindo Tbk

PT Ricky Putra Globalindo Tbk (Entitas) didirikan tanggal 22 Desember .ruang lingkup kegiatan Entitas terutama bergerak dalam bidang industri pembuatan pakaian dalam dan pakaian jadi (fashion wear). Kantor Pusat Entitas berdomisili Citeureup-Bogor, Jawa Barat, dengan lokasi pabrik di Citeureup-Bogor dan Cicalengka-Bandung. Entitas mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1988. Hasil produksi Entitas dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 2005, Entitas membeli pabrik pemintalan benang yang terletak di Bandung seluas 60.170 M2, 60.000 spindle dengan kapasitas produksi sebesar 36.000 bale per tahun. Entitas juga membuka divisi perdagangan di Pontianak, Makassar dan Samarinda yang bertujuan untuk memperluas pemasaran pakaian dalam dan pakaian jadinya di wilayah Timur Indonesia.

2) PT Sunson Textile Manufacture Tbk

PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk (“Perusahaan”) bertempat kedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia didirikan dengan nama “PT Sandang Usaha Nasional Indonesia Tekstil Industri” tanggal 18 Nopember 1972. Sesuai dengan pasal Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi usaha di bidang

industri tekstil terpadu termasuk memproduksi dan menjual benang, kain dan produk tekstil lainnya serta melakukan perdagangan umum.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1973. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Ranggamalela No. 27, Bandung dan lokasi utama bisnis Perusahaan terletak di Jl.Raya Rancaekek Km 25,5 Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

3) PT Nusantara Inti Corpora Tbk

PT Nusantara Inti Corpora, Tbk (dahulu bernama PT United Capital Indonesia, Tbk) ("Perusahaan ") didirikan tanggal 30 Mei 1988. Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang investasi. Perusahaan berdomisili di Menara Palma Lt. 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav 6 Kuningan, Jakarta 12950. Perusahaan mula beroperasi komersial pada tahun 1992.

b. Sub Sektor Kabel

1) PT Kabelindo Murni Tbk

PT Kabelindo Murni Tbk. merupakan salah satu perusahaan produsen kabel listrik dan kabel telekomunikasi tertua di Indonesia. Sejarah Kabelindo dimulai ketika didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Kabel Indonesia ("Kabelindo"), kala itu Kabelindo adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian, pada tahun 1979, kepemilikan Kabelindo berubah menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan namanya berubah menjadi PT Kabelindo Murni dan disahkan dengan Akta Pendirian No.71 tanggal 11 Oktober 1979 .

Pada tahun 1992, Kabelindo resmi menjadi perusahaan publik dan menawarkan saham perdananya sebanyak 3.100.000 lembar saham di PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) dengan kode KBLM dan jumlah saham keseluruhan yang tercatat adalah 14.000.000 lembar saham.

Menjadikan Kabelindo sebagai mitra strategis di bidang ketenagalistrikan dan telekomunikasi di Indonesia dengan memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

2) PT Jembo Cable Company Tbk

PT Jembo Cable Company Tbk didirikan tanggal 17 April 1973. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang usaha industri kabel listrik dan telekomunikasi. Kegiatan usaha komersial Perusahaan dimulai sejak tahun 1974 Perusahaan berdomisili di

Tangerang, Banten, dengan pabrik berlokasi di Jl. Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Kantor perusahaan beralamat di Mega Glodok Kemayoran, Office Tower B Lantai 6, Jl. Angkasa Kav B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat – Indonesia.

c. Sub Sektor Otomotif & Komponen

1) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk didirikan berdasarkan hasil penggabungan usaha antara PT Indomulti Inti Industri Tbk (IMII) dan PT Indomobil Investment Corporation (IIC) pada tanggal 6 November 1997 di mana IMII adalah perusahaan yang melanjutkan usaha. IMII didirikan pada tanggal 20 Maret 1987. Setelah penggabungan usaha, nama IMII berubah menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Sejak tanggal penggabungan usaha, Perusahaan dan Entitas Anak mengkonsentrasikan kegiatannya dalam bidang otomotif dan kegiatan penunjangnya.

Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut “Grup”) didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Grup bergerak dalam bidang perakitan dan distribusi kendaraan bermotor roda empat, bis dan truk, serta alat berat dengan merek “Suzuki”, “Nissan”, “Volvo”, “Volkswagen (VW)”, “SsangYong”, “AUDI”, “Hino”, “Renault”, “Manitou”, “GEHL”, “Kalmar”, “Foton”, “Great Wall”, “Dong Fang”, “Zoomlion”, “Toppile”, “SDLG”, dan “Mack” dan/atau kendaraan bermotor roda dua beserta suku cadangnya, perbengkelan, alat-alat berat, jasa keuangan, pembiayaan konsumen, penyewaan dan jual beli kendaraan bekas pakai. Bidang usaha Perusahaan adalah melakukan penyertaan saham dalam perusahaan perusahaan atau kegiatan lainnya yang terkait dengan industri otomotif.

Perusahaan berlokasi di Wisma Indomobi Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta. Fasilitas pabrik dan perakitan Grup terutama berlokasi di kawasan industri sekitar Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan fasilitas penunjang servis otomotif lainnya, seperti pembiayaan terutama berlokasi di kota besar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1990. Gallant Venture Ltd., Singapura adalah entitas induk dari Perusahaan.

2) PT Garuda Metalindo Tbk

PT Garuda Metalindo Tbk didirikantanggal 15 Maret 1982. ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang perdagangan umum, industri, dan jasa. Saat ini, Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang industri komponen dan sub komponen (termasuk mur dan baut)

kendaraan bermotor. Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23, Jakarta Utara, dan memiliki dua lokasi pabrik masing-masing terletak di Jl. Kapuk Raya No. 23, Jakarta Utara, dan Jl. Industri Raya III Blok AE No. 23 Jatake, Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1982. Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT Garuda Multi Investama, yang didirikan di Indonesia, sedangkan Entitas Induk utama Perusahaan adalah PT Graha Investama Mandiri, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

4. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub Sektor Makanan & Minuman

1) PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (Perusahaan) didirikan tanggal 17 Februari 1977 ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang usaha industri makanan, kembang gula dan biskuit. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Jakarta, sedangkan pabrik Perusahaan terletak di Tangerang dan Bekasi.

2) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk ("Perseroan") berdiri pada tahun 1995. Pabrik pertama berlokasi di Blok W, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang. Untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, Perseroan mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik di Pasuruan pada tahun 2005. Besarnya permintaan masyarakat atas produk Sari Roti membuat Perseroan kembali membangun pabrik ketiga pada tahun 2008 yang juga berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang. Kemudian disusul dengan pembangunan pabrik di Semarang, Medan dan Cikarang Barat pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Perseroan membangun 2 pabrik baru yang berlokasi di Palembang dan Makassar. Perseroan secara resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dan menjual kepada publik pada tahun 2010.

Pada tahun 2006 Perseroan mendapatkan sertifikat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yaitu sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen Perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H (Halal, Healthy, Hygienic) pada setiap produk Sari Roti. Selain itu, seluruh produk Sari Roti telah terdaftar

melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebagai produsen roti terbesar di Indonesia Perseroan telah meraih beragam penghargaan, antara lain Top Brand dan Top Brand for Kids sejak 2009 hingga sekarang, Marketing Award 2010, Original Brand 2010, Investor Award 2012, hingga penghargaan dari Forbes Asia.

3) PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk., selanjutnya disebut "Perseroan", didirikan tanggal 29 Desember 1971. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Perseroan memiliki kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang Kabupaten Bandung 40552. Perseroan bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Di bidang minuman, Perseroan memproduksi minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan, Perseroan memproduksi susu kental manis, susu bubuk dan konsentrat buah-buahan tropis. Perseroan memasarkan produknya dengan penjualan langsung, penjualan tidak langsung dan melalui pasar modern.

b. Sub Sektor Rokok

1) PT Gudang Garam Tbk

Gudang Garam Tbk (dahulu PT Perusahaan Rokok Tjap) (GGRM) didirikan tanggal 26 Juni 1958 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1958. Kantor pusat Gudang Garam beralamat di Jl. Semampir II / 1, Kediri, Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri, Gempol, Solo-Kartasura, Karanganyar dan Sumenep. Selain itu, GGRM juga memiliki kantor perwakilan di Jl. Jenderal A. Yani 79, Jakarta dan Jl. Pengenal 7 – 15, Surabaya – Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Gudang Garam Tbk adalah PT Suryaduta Investama (69,29%) dan PT Suryamitra Kusuma (6,26%). PT Suryaduta Investama merupakan induk usaha dan induk usaha terakhir GGRM. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan GGRM bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek, termasuk jenis rendah tar dan nikotin (LTN) serta produk tradisional sigaret kretek tangan. Merek-merek rokok GGRM, antara lain: Klobot, Sriwedari, Djaja, Gudang Garam, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Gold, Surya, Surya Pro Mild dan GG Mild.

2) **PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk**

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1963. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Kegiatan produksi rokok secara komersial telah dimulai pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan dengan dibentuknya NVBM Handel Maatschapij Sampoerna. Perusahaan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") memiliki 29.774 orang karyawan tetap sampai tahun 2014.

3) **PT Wismilak Inti Makmur Tbk**

PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Perusahaan), didirikan pada tanggal 14 Desember 1994, Ruang lingkup kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan melaksanakan usaha perindustrian, terutama industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya antara lain pembuatan filter rokok regular/mild;
2. Menjalankan usaha dibidang pemasaran dan penjualan produk-produk bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya antara lain pembuatan filter rokok regular/mild sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Saat ini kegiatan usaha yang dilaksanakan Perusahaan adalah pembuatan filter rokok regular/mild dan melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1994. Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Wismilak. Kantor pusat dan pabrik Perusahaan berlokasi di Surabaya, pada saat ini kantor Perusahaan terletak di Jl. Buntaran 9A, Tandes, Surabaya.

c. Sub Sektor Farmasi

1) PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berdomisili di Semarang, didirikan tanggal 18 Maret 1975. kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan (farmasi), jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa. Perusahaan berdomisili di Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 16, Jl. Pandanaran No. 30, Semarang dan pabrik berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Km 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang.

2) PT Kalbe Farma Tbk

PT Kalbe Farma Tbk. (“Perusahaan”) didirikan di Negara Republik Indonesia, pada tanggal 10 September 1966. Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi, antara lain usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat dan produk konsumsi kesehatan. Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1966. Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dimana kantor pusat berada di Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510 sedangkan fasilitas pabriknya berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin, Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

3) PT Darya Varia Laboratoria Tbk

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perusahaan”) didirikan, tanggal 5 Februari 1976. Perusahaan bergerak dalam bidang (a) industri dan perdagangan obat-obatan, obat tradisional, bahan baku untuk obat-obatan, alat kesehatan, kosmetika dan produk perawatan kesehatan; serta (b) jasa laboratorium, validasi fasilitas, klinik dan rumah sakit. Saat ini, Perusahaan aktif menjalankan bidang usaha manufaktur dan perdagangan produk-produk farmasi dan kosmetik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Pabrik dan kantor pusat Perusahaan masing-masing berlokasi di Bogor dan Jakarta. Entitas induk Perusahaan adalah Blue Sphere Singapore Pte Ltd sementara entitas induk terakhir adalah Unam (BVI) Limited, perusahaan yang berdomisili di *British Virgin Islands*.

4.2. Data Variabel Independen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Variabel independen pada penelitian ini ada dua, yaitu penjualan bersih dan beban komersial. Penjualan bersih adalah jumlah yang diterima dari penjualan setelah dikurangi nilai barang yang dikembalikan dan cadangan turunnya harga (Budi, 2009:48). Sedangkan Beban komersial merupakan total beban yang terjadi dalam keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Beban komersial adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha dan beban lain-lain. Beban pokok penjualan. (Novia, 2008:20).

Pada 36 perusahaan sampel tersebut diperoleh data penjualan bersih dan beban komersial pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut:

A. Data Penjualan Bersih

Tabel 6
Data Penjualan Bersih
(Dalam Rupiah)

4. Sektor Industri Dasar & Kimia

h. Sub sektor semen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
1	Semen Indonesia (Persero) Tbk	26.987.035.135.000	26.948.004.471.000
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.214.914.932.000	1.461.248.284.000

i. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
3	Arwana Citramulia Tbk	1.609.758.677.687	1.291.926.384.471
4	Asahimas Flat Glass Tbk	3.672.186.000.000	3.665.989.000.000

j. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
5	Betonjaya Manunggal Tbk	96.008.496.750	67.679.530.150
6	Indal Aluminium Industry Tbk	933.462.438.255	1.384.675.922.166
7	Lion Metal Works Tbk	377.622.622.150	389.251.192.409
8	Pelangi Indah Canindo Tbk	694.332.286.638	699.310.599.565

k. Sub Sektor Kimia

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
9	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	132.775.925.237	118.475.319.120
10	Indo Acidatama Tbk	472.834.591.000	531.573.325.000
11	Ekadharna International Tbk	526.573.620.057	531.537.606.573
12	Budi Starch & Sweetener Tbk	2.284.211.000.000	2.378.805.000.000
13	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	2.132.090.000.000	2.506.680.000.000

l. Sub Sektor Plastik & Kemasan

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
14	Kageo Igar Jaya Tbk	737.863.227.409	677.331.846.043
15	Trias Sentosa Tbk	2.507.884.797.367	2.457.349.444.991
16	Berlina Tbk	1.258.841.240.000	1.278.353.442.000

m. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
17	Alkindo Naratama Tbk	493.881.857.454	538.363.112.800
18	Kedawung Setia Industrial Tbk	1.626.232.662.544	1.713.946.192.967

n. Sub Sektor Pakan Ternak

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
19	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	24.458.880.000.000	25.022.913.000.000
20	Malindo Feedmill Tbk	4.502.078.127.000	4.775.014.772.000

5. Sektor Aneka Industry

d. Sub sektor tekstil dan garment

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
21	Ricky Putra Globalindo Tbk	1.185.443.580.242	1.111.051.293.008
22	Sunson Textile Manufacture Tbk	519.854.661.831	506.180.498.366
23	Nusantara Inti Corpora Tbk	102.448.044.300	118.260.140.704

e. Sub sektor kabel

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
24	Kabelindo Murni Tbk	919.537.870.594	967.710.339.797
25	Jembo Cable Company Tbk	1.493.012.114.000	1.663.335.876.000

f. Sub Sektor Otomotif & Komponen

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
26	Indomobil Sukses Internasional Tbk	19.458.165.173.088	18.099.979.783.215
27	Garuda Metalindo Tbk	961.863.464.869	858.650.225.152

6. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub sektor Makanan & Minuman

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
28	Mayora Indah Tbk	14.169.088.278.238	14.818.730.635.847
29	Nippon Indosari Corpindo Tbk	1.880.262.901.697	2.174.501.712.899
30	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	3.916.789.366.423	4.393.932.684.171

b. Sub Sektor Rokok

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
31	Gudang Garam Tbk	65.185.850.000.000	70.365.573.000.000
32	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	80.690.139.000.000	89.069.306.000.000
33	Wismilak Inti Makmur Tbk	1.661.533.200.316	1.839.419.574.956

c. Sub Sektor Farmasi

No	Nama Perusahaan	Penjualan bersih	
		2014	2015
34	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk	2.197.907.000.000	2.218.536.000.000
35	Kalbe Farma Tbk	17.368.532.547.558	17.887.464.223.321
36	Darya Varia Laboratoria Tbk	1.103.821.775.000	1.306.098.136.000

Sumber : Laporan Laba Rugi per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2015 perusahaan manufaktur diolah, 2017

B. Data Beban Komersial

Tabel 7
Data Beban Komersial
(Dalam Rupiah)

1. Sektor Industri Dasar & Kimia**a. Sub Sektor Semen**

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
1	Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.234.977.425.000	21.094.787.727.000
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk	968.566.270.000	1.145.556.776.000

b. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
3	Arwana Citramulia Tbk	1.246.378.630.291	1.182.441.015.346
4	Asahimas Flat Glass Tbk	3.150.998.000.000	3.285.056.000.000

c. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
5	Betonjaya Manunggal Tbk	90.790.570.662	73.533.474.684
6	Indal Aluminium Industry Tbk	905.702.086.993	1.317.904.199.168
7	Lion Metal Works Tbk	331.890.838.704	362.963.215.715
8	Pelangi Indah Canindo Tbk	641.219.294.154	644.613.502.983

d. Sub Sektor Kimia

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
9	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	123.914.376.148	117.770.674.070
10	Indo Acidatama Tbk	436.203.685.000	502.109.041.000
11	Ekadharna International Tbk	422.172.967.506	454.871.830.863
12	Budi Starch & Sweetener Tbk	2.240.692.000.000	2.326.680.000.000
13	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	1.959.108.000.000	2.321.154.000.000

e. Sub Sektor Plastik & Kemasan

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
14	Kageo Igar Jaya Tbk	663.091.052.042	616.622.049.845
15	Trias Sentosa Tbk	2.438.346.944.558	2.389.154.693.347
16	Berlina Tbk	1.144.384.097.000	1.218.131.965.000

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
17	Alkindo Naratama Tbk	458.825.955.244	1.035.007.329.445
18	Kedawung Setia Industrial Tbk	1.542.391.753.942	3.378.693.090.567

g. Sub Sektor Pakan Ternak

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
19	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	23.907.471.000.000	49.348.149.000.000
20	Malindo Feedmill Tbk	4.519.889.388.000	4.680.632.959.000

2. Sektor Aneka Industry**a. Sub sektor Tekstil dan Garment**

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
21	Ricky Putra Globalindo Tbk	461.622.674.421	553.136.580.636
22	Sunson Textile Manufacture Tbk	550.057.064.847	1.043.561.817.260
23	Nusantara Inti Corpora Tbk	71.704.877.553	205.210.065.862

b. Sub Sektor Kabel

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
24	Kabelindo Murni Tbk	893.499.502.763	946.701.261.405
25	Jembo Cable Company Tbk	1.405.666.712.000	1.571.409.639.000

c. Sub Sektor Otomotif & Komponen

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
26	Indomobil Sukses Internasional Tbk	19.354.948.830.649	18.133.890.660.395
27	Garuda Metalindo Tbk	800.943.942.878	725.719.189.293

3. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub Sektor Makanan & Minuman

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
28	Mayora Indah Tbk	13.639.820.571.624	13.178.235.870.046
29	Nippon Indosari Corpindo Tbk	1.619.918.154.091	1.761.265.758.539
30	Ultrajaya Milk Industry & Trading	3.618.881.278.161	8.171.248.590.356

b. Sub sektor rokok

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
31	Gudang Garam Tbk	56.643.871.000.000	60.497.768.000.000
32	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	67.147.826.000.000	75.231.593.000.000
33	Wismilak Inti Makmur Tbk	1.511.499.745.997	3.500.876.208.133

c. Sub Sektor Farmasi

No	Nama Perusahaan	Beban Komersial	
		2014	2015
34	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk	1.766.374.000.000	1.753.141.000.000
35	Kalbe Farma Tbk	14.559.933.614.053	33.051.937.112.179
36	Darya Varia Laboratoria Tbk	10.202.426.660.00	7.529.348.050.000

Sumber : Laporan Laba Rugi per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2015 perusahaan manufaktur diolah, 2017

4.3. Data Variabel dependen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang merupakan hasil yang diperoleh dari laba fiskal dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan. Menurut UU nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut data pajak penghasilan terutang tahun 2014 dan tahun 2015:

Tabel 8
Data PPh Terutang
(Dalam Rupiah)

1. Sektor Industri Dasar & Kimia

a. Sub sektor semen

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
1	Semen Indonesia (Persero) Tbk	-1.509.616.169.000	-1.325.482.459.000
2	Semen Baturaja (Persero) Tbk	-68.854.736.000	-89.234.190.000

b. Sub Sektor Keramik, Porselin & Kaca

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
3	Arwana Citramulia Tbk	86.804.627.930	24.304.373.076
4	Asahimas Flat Glass Tbk	141.011.000.000	122.917.000.000

c. Sub Sektor Logam & Sejenisnya

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
5	Betonjaya Manunggal Tbk	-1.944.806.795	-1.480.484.072
6	Indal Aluminium Industry Tbk	-10.767.831.476	-28.615.673.167
7	Lion Metal Works Tbk	-13.863.444.789	-12.433.164.026
8	Pelangi Indah Canindo Tbk	-4.311.636.994	-2.475.910.983

d. Sub Sektor Kimia

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
9	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	-2.666.140.398	-1.972.849.888
10	Indo Acidatama Tbk	-15.449.748.000	-5.209.875.000
11	Ekadharma International Tbk	-18.041.856.224	-19.266.661.660
12	Budi Starch & Sweetener Tbk	14.995.000.000	31.053.000.000
13	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	-56.377.000.000	-26.065.000.000

e. Sub Sektor Plastik & Kemasan

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
14	Kageo Igar Jaya Tbk	-21.039.436.778	-11.820.161.899
15	Trias Sentosa Tbk	-33.074.450.519	-25.783.708.943
16	Berlina Tbk	-17.794.581.000	-4.732.183.000

f. Sub Sektor Pulp & Kertas

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
17	Alkindo Naratama Tbk	-7.143.734.196	-8.374.792.461
18	Kedawung Setia Industrial Tbk	-13.888.383.230	-3.419.704.975

g. Sub Sektor Pakan Ternak

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
19	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	159.543.000.000	173.193.000.000
20	Malindo Feedmill Tbk	23.574.474.000	10.036.342.000

2. Sektor Aneka Industry

a. Sub sektor tekstil dan garment

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
21	Ricky Putra Globalindo Tbk	-6.365.106.670	-8.932.127.892
22	Sunson Textile Manufacture Tbk	4.249.340.838	3.047.164.643
23	Nusantara Inti Corpora Tbk	-25.353.626.695	-1.275.438.361

b. Sub sektor kabel

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
24	Kabelindo Murni Tbk	-6.871.966.432	-8.712.277.887
25	Jembo Cable Company Tbk	-9.300.196.000	-6.031.664.000

c. Sub Sektor Otomotif & Komponen

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
26	Indomobil Sukses Internasional Tbk	-86.720.219.140	-205.796.287.059
27	Garuda Metalindo Tbk	-45.672.046.749	-35.250.725.087

3. Sektor Barang Konsumsi

a. Sub sektor Makanan & Minuman

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
28	Mayora Indah Tbk	119.649.017.130	390.261.637.241
29	Nippon Indosari Corpindo Tbk	64.208.995.297	107.712.914.648
30	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk	-91.896.185.643	-177.575.035.200

b. Sub Sektor Rokok

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
31	Gudang Garam Tbk	-1.822.046.000.000	-2.182.441.000.000
32	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-3.537.216.000.000	-3.569.336.000.000
33	Wismilak Inti Makmur Tbk	37.359.691.059	46.881.830.192

c. Sub Sektor Farmasi

No	Nama Perusahaan	PPh Terutang	
		2014	2015
34	Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk	-131.231.000.000	-122.924.000.000
35	Kalbe Farma Tbk	642.915.814.984	-663.186.962.586
36	Darya Varia Laboratoria Tbk	-25.159.730.000	-36.543.278.000

Sumber : Laporan Laba Rugi per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2015 perusahaan manufaktur diolah, 2017

4.4. Analisis Data

4.4.1. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti minimum, maksimum, mean (rata-rata), standar deviasi, varian, dan lain-lain. Berikut hasil uji analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penjualan bersih	72	67679530150	89069306000000	8269039933102,71	18134653698455,280
Beban komersial	72	71704877553	130863341000000	9899450714382,12	21154891926169,613
PPh terutang	72	-3569336000000	642915814984	-193934992011,61	711601109299,034
Valid N (listwise)	72				

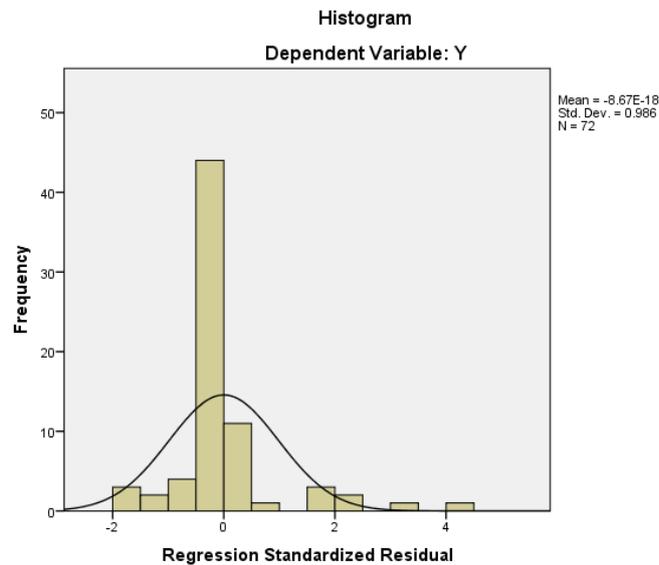
Sumber : Data diolah (Ouput SPSS), 2017

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui untuk variabel X_1 (Penjualan Bersih) jumlah data 72, dengan rata-rata sebesar Rp8.269.039.933.102,71 dan standar deviasi sebesar Rp18.134.653.698.455,280. Variabel X_2 (Beban Komersial) jumlah data 72, dengan rata-rata sebesar Rp9.899.450.714.382,12 dan standar deviasi sebesar Rp21.154.891.926.169,613. Sedangkan variabel Y (Pajak Penghasilan Terutang) jumlah data 72, dengan rata-rata sebesar Rp193.934.992.011,61 dan standar deviasi sebesar Rp711.601.109.299,034. Perusahaan sampel dengan penjualan bersih tertinggi yang digunakan pada penelitian ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar Rp89.069.306.000.000 dan terendah yaitu PT Betonjaya Manunggal Tbk sebesar Rp67.679.530.150. sedangkan Perusahaan sampel dengan beban komersial tertinggi yang digunakan pada penelitian ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebesar Rp75.231.593.000.000, dan yang terendah yaitu PT Betonjaya Manunggal Tbk sebesar Rp73.533.474.684.

4.4.2. Uji Asumsi Klasik

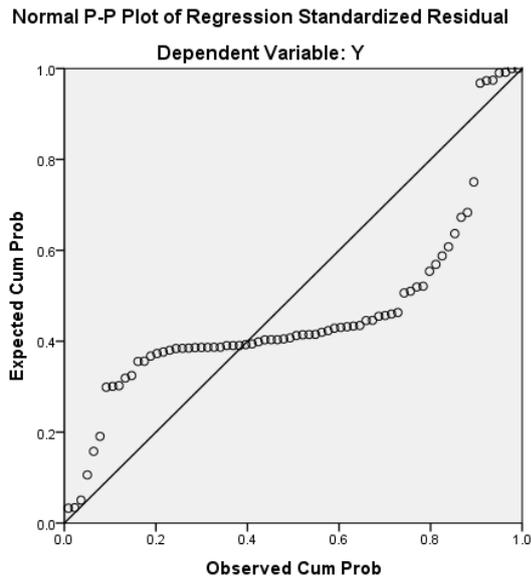
1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji histogram dan uji normal P Plot. . Berikut hasil uji normalitas yang disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2

Hasil Uji Normalitas



Gambar 3

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah (Ouput SPSS), 2017

Berdasarkan analisis grafik (histogram), grafik pada Gambar 2 di atas tampak bahwa grafik berbentuk lonceng (*bell-shaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Analisis grafik (*normal probability plot*), pada Gambar 3 di atas tampak bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	85394259543,058	37737007072,310		2,263	,027		
1 Penjualan bersih	,049	,005	1,243	10,590	,000	,169	5,927
Beban komersial	,013	,004	,372	3,171	,002	,169	5,927

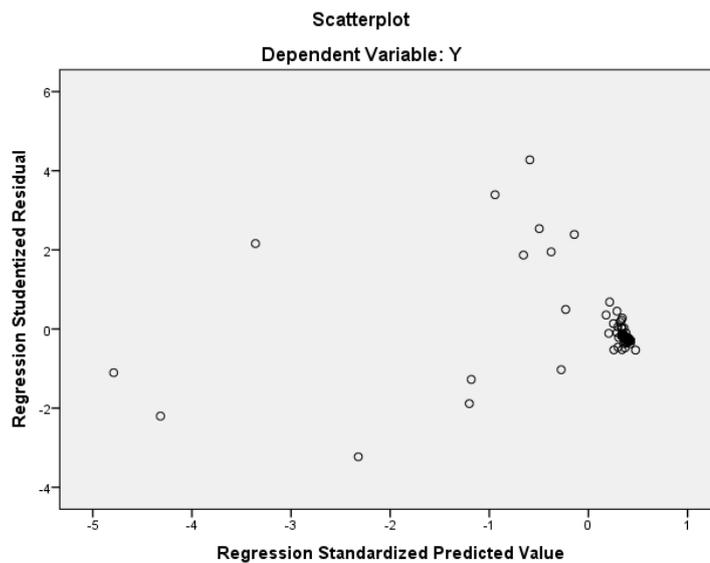
a. Dependent Variable: PPh terutang

Sumber : Data diolah (*output SPSS*),2017

Syarat yang digunakan untuk mengukur multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* kurang dari 0.01 dan nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0.01 dan VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik – titik pada scatterplots regresi. Jika titik – titik menyebar dengan pola yang tidak jelas maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (output SPSS),2017

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan uji *Durbin – Watson* (DW). Dasar pengambilan keputusan :

- a. $DU < DW < 4-DU$ artinya tidak terjadi autokorelasi.
- b. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ artinya terjadi autokorelasi.
- c. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$ artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang berarti.

Berikut hasil uji autokorelasi yang disajikan pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,916 ^a	,840	,835	289048170723,198	1,775

a. Predictors: (Constant), beban komersial, penjualan bersih

b. Dependent Variable: PPh terutang

Sumber : Data diolah (output SPSS),2017

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 11, menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,775. Dari tabel *Durbin-Watson* dapat diketahui bahwa nilai DL adalah 1,5611 dan DU adalah 1,6751. Syarat suatu model regresi bebas dari Autokorelasi adalah Nilai DW tersebut berada diantara $DU < DW < 4-DU$ { $1,6751 < 1,775 < (4-1,6751)$ } atau hasil akhirnya ($1,6751 < 1,775 < 2,3249$). Hal ini membuktikan bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini.

4.4.3. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan apakah pengaruh masing – masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen secara parsial. Koefisien regresi masing – masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen jika $-t$ hitung $< -t$ tabel atau t hitung $> t$ tabel. t tabel dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan tingkat derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 72-2-1 = 69$.

Hipotesis ditolak bila nilai sig. $> 0,05$ dan Hipotesis diterima bila nilai sig. $< 0,05$ Berikut hasil uji t yang disajikan pada tabel 12.

Tabel 12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	85394259543,058	37737007072,310		2,263	,027
1 Penjualan bersih	,049	,005	1,243	10,590	,000
Beban komersial	,013	,004	,372	3,171	,002

a. Dependent Variable: PPh terutang
Sumber : Data diolah (output SPSS)

Analisis uji t berdasarkan tabel 12 adalah sebagai berikut:

- Variabel penjualan bersih (X_1) memiliki nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig.t $< 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, nilai t tabel (0,05:69) adalah 1,994. Dengan demikian hasilnya, t hitung $> t$ tabel ($10,590 > 1,994$).
- Variabel Beban Komersial (X_2) memiliki nilai sig. 0,002 lebih kecil dari 0,05 (sig.t $< 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, nilai t tabel (0,05:69) adalah 1,994. Dengan demikian hasilnya, t hitung $> t$ tabel ($3,171 > 1,994$).

2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini mensyaratkan jika F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan Hipotesis ditolak bila nilai sig. > 0.05, Hipotesis diterima bila nilai sig. < 0.05 Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA. Berikut merupakan hasil dari Uji F.

Tabel 13
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	30187835546757285 000000000,000	2	1509391777337864 2000000000,000	180,660	,000 ^b
Residual	57648703048914620 00000000,000	69	8354884499842698 0000000,000		
Total	35952705851648748 000000000,000	71			

a. Dependent Variable: PPh terutang

b. Predictors: (Constant), beban komersial, penjualan bersih

Sumber : Data diolah (*output* SPSS)

Hasil pengolahan data berdasarkan tabel 13 menunjukkan hasil F hitung sebesar 180,660 yang signifikan pada 0,000. Jadi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig. 0,000 < 0,05) dan nilai F tabel (0,05;2;69) adalah 3,13 maka hasilnya, F hitung > F tabel (180,660 > 3,13) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen penjualan bersih dan beban komersial secara bersama – sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang.

3. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (variabel-variabel independen) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil dari analisis determinasi :

Tabel 14
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,916 ^a	,840	,835	289048170723,198

a. Predictors: (Constant), beban komersial, penjualan bersih

b. Dependent Variable: PPh terutang

Sumber : Data diolah (*output SPSS*),2017

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) sebesar 0,840 (84%). Artinya, kontribusi pengaruh semua variabel independen (Penjualan bersih dan Beban Komersial) terhadap variabel dependen Pajak Penghasilan terutang adalah sebesar 84% , sedangkan sisanya sebesar 16% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.4.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil uji analisis regresi berganda disajikan pada tabel 15.

Tabel 15
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	85394259543,058	37737007072,310		2,263	,027
1 Penjualan bersih	,049	,005	1,243	10,590	,000
Beban komersial	,013	,004	,372	3,171	,002

a. Dependent Variable: PPh terutang

Sumber : Data diolah (*output SPSS*),2017

Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = (85394) + 0,049 \text{ penjualan bersih} + 0,013 \text{ beban komersial} + e$$

$$Y = 0,049 \text{ penjualan bersih} + 0,013 \text{ beban komersial} + e$$

$$Y = \text{Pajak Penghasilan terutang}$$

- a = Konstanta
- b_1 b_2 = Koefisien Regresi
- X_1 = Penjualan Bersih
- X_2 = Beban komersial
- e = *Error Term*

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konstanta
Konstanta sebesar (85394) memberi arti apabila semua variabel independen yaitu penjualan bersih dan beban komersial tidak ada atau dianggap konstan (bernilai 0), maka pajak penghasilan terutang nilainya 85394 atau mengalami penurunan sebesar (85394).
2. Koefisiensi Regresi Variabel penjualan bersih
Koefisien regresi variabel penjualan bersih (b_1) bernilai positif yaitu, 0,049 artinya apabila penjualan bersih naik sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka pajak penghasilan terutang akan mengalami kenaikan sebesar 0,049 satuan.
3. Koefisiensi Regresi Variabel beban komersial
Koefisien regresi variabel beban komersial (b_2) bernilai positif yaitu, 0,013 artinya apabila beban komersial naik sebesar satu satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka pajak penghasilan terutang akan mengalami kenaikan sebesar 0,013 satuan.

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 21 tentang pengaruh Penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang , berikut adalah interpretasi dari hasil pengujian :

Tabel 16
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Hasil Uji Hipotesis
H1	Penjualan Bersih berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang	Diterima
H2	Beban Komersial berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang	Diterima
H3	Penjualan Bersih dan beban komersial berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang	Diterima

4.5.1. Pengaruh Penjualan Bersih terhadap Pajak Penghasilan terutang

Berdasarkan hasil penelitian ini, penjualan bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t, di mana nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.t} < 0,05$), dan nilai dari t hitung $>$ t tabel ($10,590 > 1,994$) yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Endah Nilam (2010), yang menyatakan bahwa pajak penghasilan terutang dipengaruhi secara positif oleh *Debt to Equity Ratio* (DER), selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ema Novasari (2013) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap harga saham. Harga saham dan Pajak Penghasilan terutang merupakan refleksi dari laba perusahaan. (Yulianti, 2008, 70). Proporsi utang dan modal yang optimal dengan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan laba perusahaan, yang selanjutnya meningkatkan pula harga saham dan Pajak Penghasilan terutang. Menurut Siti Resmi (2015, 139) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperbesar perbandingan antara utang dan modal (DER). Dengan memperbesar jumlah utang, maka dapat mempertinggi rasio DER sehingga beban bunga yang merupakan bagian dari beban komersial dapat menjadi pengurang pajak yang relatif besar.

Dengan demikian penambahan ataupun pengurangan penjualan bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan tersebut.

4.5.2. Pengaruh Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang

Berdasarkan hasil penelitian ini, beban komersial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t, di mana nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.t} < 0,05$), dan nilai dari t hitung $>$ t tabel ($3,171 > 1,994$) yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nindri (2015) yang menyatakan bahwa beban penyusutan dan beban bunga yang dibayarkan untuk utang semakin memperkecil nilai laba perusahaan yang pada akhirnya mengecilkan pula nilai Pajak Penghasilan terutang.

Bagi perusahaan peningkatan beban komersial dapat membawa pengaruh positif yaitu penghematan Pajak Penghasilan terutang, akan tetapi bagi pemerintah (fiskus), jika perusahaan meningkat beban komersialnya tentu penerimaan dari sektor PPh Badan akan berkurang. Untuk itu peningkatan beban komersial yang terkait dengan perhitungan PPh terutang perlu mendapat pengawasan yang lebih karena dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Salah satu caranya dengan lebih memperhatikan isi peraturan pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Tahun 2008 mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.

4.5.3. Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara simultan penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji F dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig. 0,000 < 0,05) dan nilai dari F hitung > F tabel (180,660 > 3,13) Dengan demikian secara simultan model regresi tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang dengan presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak tersebut untuk memaksimalkan laba dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Usaha wajib pajak untuk memperkecil Pajak penghasilan terutangnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa diantaranya yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pemilihan metode akuntansi dan dengan pembelian aset dengan sewa guna usaha.

Dengan demikian penjualan bersih dan beban komersial secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2014 dan 2015. Dari hasil analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan dua variabel independen (penjualan bersih dan beban komersial) dan satu variabel dependen (pajak penghasilan terutang) yang telah dilakukan pada BAB IV, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Variabel penjualan bersih dalam uji t mempunyai nilai sig.0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa penjualan bersih berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan ataupun pengurangan penjualan bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan tersebut.
2. Variabel beban komersial dalam uji t mempunyai nilai sig.0,002 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa beban komersial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan beban komersial dapat membawa pengaruh positif yaitu penghematan Pajak Penghasilan terutang, akan tetapi bagi pemerintah (fiskus), jika perusahaan meningkat beban komersialnya tentu penerimaan dari sektor PPh Badan akan berkurang. Untuk itu peningkatan beban komersial yang terkait dengan perhitungan PPh terutang perlu mendapat pengawasan yang lebih karena dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Salah satu caranya dengan lebih memperhatikan isi peraturan pada pasal 6 ayat 1 UU PPh Tahun 2008 mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan.
3. Variabel independen (penjualan bersih dan beban komersial) pada uji F memiliki nilai sig.0,000 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pajak Penghasilan terutang) pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak tersebut untuk memaksimalkan laba dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Usaha wajib pajak untuk memperkecil PPh terutangnya

dapat dilakukan dengan penambahan atau pengurangan penjualan bersih, dan meningkatkan beban komersial sesuai dengan peraturan UU PPh tahun 2008.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat menggunakan metode perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya pajak terutang secara tepat dan legal sesuai ketentuan perpajakan, misalnya dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang, pemilihan metode akuntansi, memperbesar penjualan dan memberdayakan aset.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasikan dan untuk memperluas penelitian serta menghasilkan analisis yang lebih baik.
3. Penelitian ini meneliti 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama dua tahun, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan rentang waktu yang lebih lama dan dengan menambahkan jumlah perusahaan berdasarkan tiap sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Azhari. 2015. *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi pada perusahaan penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bambang Riyanto. 2011. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Empat*. Yogyakarta. BPFE.
- Beams, Floyd A., Joseph H. Anthony, Robin P. Clement, Suzzane H. Lowensohn. 2007. *Akuntansi Lanjutan Jilid 2 Edisi 8*. Alih bahasa Chalie Saputra. Jakarta. PT. Indeks.
- Budi Rahardjo. 2009. *Laporan Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Casavera. 2009. *Seri Perpajakan Indonesia 5: Undang-Undang No.36 2008 tentang Perubahan dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Endah Nilam. 2010. *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jan Horas V. Purba. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bogor. Universitas Pakuan (Diktat Kuliah).
- Kotler, Philip. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Alih bahasa: Hendra Teguh, Ronny A Rusli, dan Benyamin Molan. Jakarta. PT Indeks.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Nindri Putri. 2015. *Pengaruh Modal Sendiri dan Utang Jangka Panjang Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Bogor. Universitas Pakuan.
- Nur Wachidah Yulianti. 2008. *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Patar Simamora dan Muhamad Ressa. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-20.*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE). Vol 1 No.2:Hal 21-2-31, E-ISSN : 2502-4159.

- Sanwanih. 2006. *Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Pajak Terhadap Laba Setelah Pajak Pada Industry Makanan dan Minuman*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siti Nurjannah. 2008. *Pengaruh Pendapatan dan Beban Terhadap Pajak: Laba Sebelum Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45)*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siti Resmi. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sofjan Assauri. 2013. *Manajemen Pemasaran Dasar-Dasar, Konsep, dan Strategi Edisi 1*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sofyan Syafri Harahap. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sofyan Syafri Harahap. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. CV Alfabeta.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

